

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PETERNAKAN ACEH

TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH ACEH

DINAS PETERNAKAN

Jalan Mr. Muhammad Hasan No.147 Banda Aceh 23245

Telepon (0651) 7559050 – 7559090, Faksimil (0651) 7559060

E-mail : dinkeswannak@acehprov.go.id, Website : disnak.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu unsur perangkat Aceh, Dinas Peternakan Aceh berkewajiban menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dan Surat Gubernur Nomor 050/100 Tanggal 4 Januari 2021. Secara teknis Renstra empat tahun ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan yang biasanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) ini pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra 2023-2026 ini memuat gambaran tentang pendahuluan, gambaran umum, gambaran pelayanan SKPA, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, kerangka pendanaan pembangunan dan program SKPA, serta kinerja penyelenggaraan pelayanan SKPA dan penutup. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 ini didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
3. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026;
4. Evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022.

Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang optimal demi satu tujuan mewujudkan kedaulatan pangan Aceh melalui penyelenggaraan pembangunan subsektor peternakan di Provinsi Aceh. Semoga Rencana Strategis tahun 2023-2026 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan peternakan di Aceh.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN ACEH

Zalsufan, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730609 200904 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	15
2.1.1. Tugas dan Fungsi SKPA.....	15
2.1.2. Struktur Organisasi SKPA.....	16
2.2. Sumber Daya.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan.....	27
2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	52
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	56
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi.....	56
3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	61
3.3. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	63
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	64
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	67
4.1. Tujuan	67
4.2. Sasaran	67
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	70
5.1. Strategi.....	70
5.2. Arah Kebijakan.....	72
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	74
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	74
6.2. Pendanaan.....	79
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
BAB VIII. PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rincian Jumlah Pegawai Negari Sipil Dinas Peternakan Menurut Pangkat/Golongan per 31 Desember 2021.....	25
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Dinas Peternakan Aceh Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2021.....	25
Tabel 2.3.	Jumlah PNS Dinas Peternakan Aceh yang menduduki jabatan Struktural dan Non Struktural Laki-laki dan Perempuan per 31 Desember 2021.....	26
Tabel 2.4.	Jumlah PNS Dinas Peternakan Aceh yang menduduki jabatan Fungsional.....	27
Tabel 2.5	Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2015 – 2020.....	31
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Aceh (TC-23).....	33
Tabel 2.7	Produksi Daging Aceh Tahun 2019-2021.....	34
Tabel 2.8	Produksi Telur Aceh Tahun 2019-2021.....	34
Tabel 2.9	Populasi dan Penyebaran Ternak Ruminansia di Provinsi Aceh Tahun 2021.....	35
Tabel 2.10	Target dan Realisasi IB Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	36
Tabel 2.11	Target dan Realisasi PKB Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	37
Tabel 2.12	Target dan Realisasi Kelahiran.....	38
Tabel 2.13	Persentase Kelahiran Ternak Ruminansia Provinsi Aceh Tahun 2017-2020 berdasarkan komoditi.....	39
Tabel 2.14	Populasi dan Penyebaran Ternak Unggas di Provinsi Aceh Tahun 2021.....	40
Tabel 2.15	Rekapitulasi Jenis Kasus Penyakit Hewan Menular Strateis di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.....	42
Tabel 2.16	Rekapitulasi Puskesmas di Provinsi Aceh Tahun 2021.....	42
Tabel 2.17	Konsumsi Produk Peternakan Per Kapita Per Minggu 2016- 2020.....	47
Tabel 2.18	Evaluasi capaian SDG Disnak 2019-2020.....	49
Tabel 2.19	Evaluasi capaian SDG Disnak 2021.....	50
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan Aceh Tahun 2018-2022 (TC-24).....	51
Tabel 3.1	Laju dan Nilai Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut LapanganUsaha, Tahun 2016 -Triwulan III-2021(Persen).....	56
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternak.....	59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan Aceh (TC-25).....	69
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (TC-26).....	73
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (TC-27).....	80
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPA (TC-28).....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Aceh	24
Gambar 2.2. PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28
Gambar 2.3. Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29
Gambar 2.4. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020.	29
Gambar 2.5 Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2015 – 2020.....	30
Gambar 3.1. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) Subsektor Peternakan Tahun 2019-2021.....	60
Gambar 3.2 Indeks harga yang diterima petani (It) subsektor peternakan tahun 2018-2021.....	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan satu daerah yang memiliki banyak populasi ternak. Hal ini didukung oleh banyak sentra peternakan rakyat yang memelihara sapi, kerbau, kambing, dan unggas. Peternakan di Aceh telah menyatu dalam kehidupan budaya masyarakat pedesaan secara turun-temurun. Tidak jarang terjadi, pada saat petani mengalami kegagalan panen tanaman pangan, ternak menjadi penyelamat ekonomi keluarga petani. Oleh karena itu, peternakan rakyat merupakan bagian dari tulang punggung ekonomi negara. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Aceh dan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi akan mendorong meningkatnya konsumsi pangan dan permintaan produk hasil ternak (daging, telur, dan susu) dua kali lipat dari saat ini. Bahkan pada saat-saat tertentu, Budaya masyarakat Aceh seperti meugang, kenduri, pesta rakyat, dan kebutuhan lainnya, semakin menambah tingginya permintaan ternak di Aceh, terutama sapi. Pada saat permintaan tinggi, maka suplai ternak tidak bisa diandalkan dari peternakan rakyat. Kebutuhan ini hanya dapat dipenuhi dari industri peternakan (*fattening*). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sapi termasuk di Provinsi Aceh. Berbagai macam bangsa sapi potong telah diimpor baik berupa ternak hidup maupun dalam bentuk semen beku untuk disilangkan dengan sapi Aceh sehingga menghasilkan sapi-sapi silangan.

Dalam rangka mewujudkan Aceh sebagai wilayah sentra pengembangan peternakan, diperlukan penyusunan suatu rencana strategis yang komprehensif oleh perangkat daerah Aceh yang membidangi sub sektor peternakan sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional secara keseluruhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga kembali menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya mengarahkan agar penyusunan perencanaan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah atas. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah propinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 5 Juli 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut perlu diangkat pejabat Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Kebijakan tersebut pada akhirnya juga menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Mengingat RPJMA sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, tentu periode RPJMA juga berakhir seiring berakhirnya periode jabatan kepala daerah. Sebagai tindak lanjut, maka dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat tersebut, maka SKPA Dinas Peternakan Aceh juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang berdasarkan pada Dokumen RPA dimaksud.

1.1.1 Pengertian Renstra

Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 4 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPA serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Akan tetapi menjadi suatu yang berbeda pada penyusunan untuk periode ini yang disusun untuk 4 (empat) tahun. Perbedaan masa berlaku ini berhubungan dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Secara teknis Renstra empat tahun ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

1.1.2 Fungsi Renstra

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Rencana Strategis (Renstra) ini pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Dinas Peternakan Aceh Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan peternakan untuk tahun 2023 sampai dengan 2026. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahunnya yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu setiap 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

1.1.3 Proses Penyusunan

Perumusan Renstra Dinas Peternakan Aceh Tahun 2023-2026, sama halnya dengan RPA dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen;
2. Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 diantaranya berkaitan dengan ekonomi, sumber daya manusia (SDM);
3. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPA sampai dengan Tahun 2025;

4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMA Tahun 2017-2022, dengan melihat evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra SKPA dan Renja SKPA sampai dengan Tahun 2021;
5. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
6. Isu-isu strategis yang berkembang, seperti penanganan Covid-19, pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, dan penurunan dana Otsus Aceh mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 menjadi 1 (satu) persen dari DAU nasional. Selain itu juga isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) perangkat daerah;
7. Kebijakan nasional, seperti dana wajib (*mandatory spending*) dan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19;
8. Regulasi yang berlaku, termasuk yang berkaitan dukungan bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED);
9. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Proses penyusunan Rencana Setrategis Dinas Peternakan Aceh dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi Bappeda Aceh tentang teknis Penyusunan RPA dan Renstra Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022.
2. Rapat Persiapan Penyusunan Renstra di Subbag Program Informasi dan Humas pada tanggal 4 Januari 2022;
3. Sosialisasi dan penjelasan penyusunan Renstra Dinas Peternakan Aceh kepada seluruh pejabat lingkup Disnak Aceh pada tanggal 5 Januari 2022;
4. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang di SK kan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 6 Januari 2022.
5. Menyusun timeline penyusunan Renstra dan agenda kerja pada tanggal 10 Januari 2022;
6. Pengisian Tabel TC 23, TC 24, TC 25, TC 26, dan TC 27 secara online melalui google spreadsheet tanggal 10-11 Januari 2022;
7. Pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Dinas Peternakan Aceh oleh Tim Penyusun pada tanggal 12 Januari 2022 di Aula Dinas;
8. Pra desk penyusunan Ranwal Renstra Dinas Peternakan Aceh untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 Januari 2022 di Beppeda Aceh;

9. Pertemuan tim penyusun terkait tujuan, sasaran, indicator kinerja, dan program prioritas pada tanggal 17 Januari 2022;
10. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Dinas Peternakan Aceh tanggal 18-21 Januari 2022;
11. Pertemuan tim penyusun Renstra Distanbun Aceh 2023-2026 untuk Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Dinas Peternakan Aceh tanggal 25 Januari 2022 di Aula Dinas;
12. Menelaah draft Rencana Pembangunan Aceh (RPA), RPJMN, RKP, Renstra Kementerian Pertanian, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), RTRW, dan KLHS tanggal 26- 28 Januari 2022;
13. Pengumpulan data, dokumen dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Renstra tanggal 2- 7 Pebruari 2022;
14. Forum Konsultasi Publik RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 8 Februari 2022 dengan tujuan menyerap aspirasi dari stakeholders yang ada untuk kesempurnaan RPA Tahun 2023-2026 dengan mengundang DPRA, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
15. Perbaikan indikator kinerja, program, dan pengayaan terhadap isu-isu strategis dari hasil konsultasi publik dilaksanakan tanggal 9-11 Februari 2022
16. Pengolahan dan analisis data sebagai bahan input dalam draft Rancangan Awal Renstra tanggal 21- 23 Pebruari 2022;
17. Pra Desk Rankir Renstra Dinas Peternakan 2023-2026 tanggal 24 Februari 2022 di Bappeda Aceh;
18. Penyesuaian hasil pra desk Rankhir SKPA pada tanggal 24-25 Februari 2022;
19. Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota tanggal 4-11 Maret 2022 di Grand Arabia Hotel dan Bappeda Aceh;
20. Penjelasan Inputan Ranwal Renstra 2023-2026 dan pengambilan cascading Renstra di Bappeda tanggal 16 Maret 2022
21. Penginputan RKPD pada Aplikasi SIPD tanggal 17- 22 Maret 2022
22. Penjelasan proses verifikasi usulan masyarakat dalam SIPD tanggal 25 Maret 2022;
23. Penyusunan Rancangan Akhir (Rankir) Renstra Dinas Peternakan Aceh 2023-2026 tanggal 25- 30 Maret 2022;
24. Mengikuti forum konsultasi publik RPA tanggal 31 Maret 2022 di Hotel Grand Nanggroe;
25. Sosialisasi Desk Rancangan Akhir (Rankir) Renstra SKPA 2023-2026 di Bappeda Aceh pada tanggal 4 April 2022;
26. Penyusun Rankir Renstra Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 4-5 April 2022;

27. Desk Rancangan Akhir Renstra SKPA 2023-2026 pada tanggal 6 April 2022 di Bappeda Aceh;
28. Perbaikan Hasil Desk Rankir Renstra dan tanggal 6-7 April 2022;
29. Finalisasi Rankir Renstra menjadi Renstra tanggal 7 April 2022;
30. Penyerahan Renstra Dinas Peternakan Aceh 2023-2026 ke Bappeda Aceh tanggal 8 April 2022;
31. Penetapan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Gubernur Aceh pada tanggal 8 April 2022.

1.1.4 Keterkaitan dengan RPA

Salah satu tujuan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19. Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian Aceh serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian.

Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat petani khususnya petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif dibidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi petani peternak. Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 4.11 persen. Peningkatan nilai kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.27 persen yang diakibatkan oleh rendahnya produksi daging ayam petelur.

Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. Nilai tukar petani (NTP) merupakan suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan petani, termasuk peternak Kondisi NTP Peternakan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu berada diatas 100, NTPt tahun 2018 mengalami kenaikan lalu kemudian menurun di tahun 2019. Penurunan Rata-rata NTPt tahun 2019 disebabkan peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata harga yang diterima petani, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak mulai mengalami peningkatan, karena indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayarkan.

1.1.5. Renstra K/L

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 secara jelas menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yaitu a) Terjaganya ketahanan pangan nasional; b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, c) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan e) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian. Sejalan dengan renstra K/L tersebut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah pada subsektor peternakan melalui Dinas Peternakan Aceh adalah meningkatkan produksi daging dan telur serta meningkatkan nilai tambah produk peternakan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Aceh sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
37. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008;
38. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
39. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033;
40. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
41. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
42. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
43. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
44. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
45. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
46. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh;
47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penyusunan Rentra

Agar pengembangan peternakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan yang disusun dalam suatu dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Aceh Tahun 2023-2026. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Rencana Strategis (Renstra) ini pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dokumen Renstra Dinas Peternakan Aceh Tahun 2023-2026 disusun sebagai penjabaran dari RPA Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan Pemerintah Aceh berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Peternakan.

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra

Renstra Dinas Peternakan Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang peternakan dalam periode empat tahun, ditetapkan dengan tujuan:

- 1) Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Aceh selama tahun 2023-2026;
- 2) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Peternakan Aceh periode empat tahun berdasarkan RPA 2023-2026;
- 3) Menjadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026,
- 4) Sebagai dasar dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan Aceh tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026;
- 5) Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
- 6) Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja dan responsif gender;
- 7) Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19;

- 8) Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Peternakan Aceh Tahun 2023-2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan hal-hal yang melatar belakangi penyusunan dan fungsi Renstra SKPA dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra SKPA dengan RPA;

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra SKPA;

1.3 Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPA;

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPA dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPA periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPA yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMA periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPA ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi SKPA. Uraian tentang struktur organisasi SKPA ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPA (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan;

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA berdasarkan sasaran/target Renstra SKPA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPA pada empat (4) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan;

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian;

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPA ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPA, Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan

demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPA tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPA. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPA beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat (4) tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima (5) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA.

BAB VIII. PENUTUP.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga dipaparkan Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah secara garis besar memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPA periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPA yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMA periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPA.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi SKPA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh, Tugas Pokok Dinas Peternakan adalah melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peternakan;
- d. Penyusunan program di bidang peternakan;
- e. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan peternakan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan dan peternakan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Peternakan mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang peternakan;

- b. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- c. Menetapkan standar pembibitan/pembenihan peternakan;
- d. Melakukan promosi ekspor komoditas peternakan di Provinsi Aceh;
- e. Menyediakan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang peternakan;
- f. Mengatur penggunaan bibit unggul di sektor peternakan;
- g. Menetapkan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
- h. Melaksanakan penyidikan penyakit di bidang peternakan lintas Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang peternakan;
- j. Melakukan pengendalian mutu peternakan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor peternakan.

2.1.2. Struktur Organisasi SKPA

Susunan Organisasi Dinas Peternakan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak
- d. Bidang Pakan
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Susunan Organisasi pada UPTD Dinas Peternakan ditata kembali melalui peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh, sehingga susunan organisasi dan tata kerja UPTD terdiri dari :

- a. UPTD Laboratorium Veteriner
- b. UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI)
- c. UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR)

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan hewan dan veteriner, usaha pengolahan, pemasaran hasil, pembibitan dan produksi ternak serta pakan. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- d. Penyusunan program di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- e. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan kesehatan hewan dan peternakan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Peternakan Aceh. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak

Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong/perah, dan inseminasi buatan. Bidang

Pembibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melakukan standarisasi dan mutu ternak, pemeliharaan ruminasia potong/perah, serta melakukan inseminasi buatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan standarisasi mutu ternak dan mutu bibit;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan proses produksi ternak;
- c. pelaksanaan bimbingan pemeliharaan ruminansia potong/perah;
- d. pelaksanaan bimbingan pengembangan produksi ternak melalui inseminasi buatan;

4. Bidang Pakan

Bidang Pakan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bahan pakan, pakan hijauan dan pakan olahan, mutu, keamanan dan pendaftaran pakan. Bidang Pakan mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan pakan, lahan pakan hijauan, pemanfaatan pakan olahan, pengendalian mutu, keamanan dan pendaftaran pakan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan pengelolaan bahan pakan, peredaran dan penggunaan pakan;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan pakan hijauan dan pakan olahan;
- c. pelaksanaan bimbingan pengembangan kawasan dan lokasi potensial;
- d. pelaksanaan bimbingan mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pakan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, dan perlindungan hewan. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai tugas melakukan pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta perlindungan hewan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan bimbingan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan;
- b. pelaksanaan kegiatan bimbingan pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan dan pembinaan kelembagaan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan kegiatan bimbingan pengawasan dan perlindungan hewan;
- d. pelaksanaan kegiatan bimbingan medik dan paramedik veteriner, pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;

- e. pelaksanaan bimbingan pengawasan higiene sanitasi pada mata rantai produksi pangan asal hewan dan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan serta produk hewan non pangan;
- f. pelaksanaan bimbingan pengujian keamanan produk hewan, pengendalian penyakit zoonosis, pengamanan dan perlindungan produk pangan asal hewan serta bimbingan penerapan kesejahteraan hewan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan pembinaan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil dan pasca panen;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan pengembangan usaha peternakan dan investasi;
- c. pelaksanaan bimbingan pelayanan usaha agribisnis peternakan;
- d. pelaksanaan bimbingan pemasaran dan informasi pasar;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD Laboratorium Veteriner

UPTD Laboratorium Veteriner merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan Aceh. UPTD Laboratorium Veteriner dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh. UPTD Laboratorium Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Peternakan Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, UPTD Laboratorium Veteriner mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Veteriner;
- b. Penyusunan program UPTD Laboratorium Veteriner;

- c. Pelaksanaan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam hal penentuan penyakit hewan dan langkah-langkah preventif dan kuratif terhadap sampel hewan yang diperiksa;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap penyakit hewan;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan surveilans penyakit hewan, pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - g. Penetapan secara dini wilayah wabah penyakit hewan tertentu untuk tindakan isolasi/penyebaran penyakit hewan;
 - h. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyakit hewan di daerah sebagai data yang berkaitan dengan kesehatan hewan;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. BLUD UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR)

Pada awalnya bernama UPTD Balai Ternak Non Ruminansia merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan Aceh yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh. Kemudian berubah nama dan struktur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia Pada Dinas Peternakan Aceh, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis bidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia serta mengembangkan pola kerjasama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait. Untuk memudahkan dalam manajemen pengelolaan kearah yang lebih baik dan menerapkan praktek bisnis yang sehat, maka pengelolaan UPTD Balai Ternak Non Ruminansia kembali mengalami perubahan menjadi pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Tugas Daerah Balai Ternak Non Ruminansia (BLUD UPTD BTNR) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan Aceh yang melaksanakan kegiatan teknis dibidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia. UPTD BTNR dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Tugas Daerah Balai Ternak Non Ruminansia. BLUD UPTD BTNR mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di dibidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia;

- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Pembinaan dan Pengadaan Sarana produksi ternak non ruminansia;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3 (tiga) dan sektor 4 (empat) (pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan/ *village poultry farming*, penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, pembinaan kemitraan ayam ras);
- e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan produksi telur dan daging unggas;
- f. pembinaan peningkatan mutu dan pemanfaatan alat dan mesin peternakan;
- g. peningkatan pemanfaatan bahan pakan lokal;
- h. pengkoordinasian pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia dan pemasaran;
- i. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh.

9. UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI)

UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) merupakan gabungan dari dua UPTD yaitu UPTD Balai Inseminasi Buatan dan UPTD Inkubator Kader Peternakan yang kemudian dilebur menjadi satu UPTD. UPTD IBI perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh. UPTD IBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang inseminasi buatan dan inkubator peternakan pada Dinas Peternakan Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program perencanaan di bidang inseminasi buatan dan inkubator peternakan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan (*bull*);
- d. pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas pejantan unggul serta pengembangan bioteknologi;

- e. pelaksanaan produksi, penyimpanan dan distribusi semen beku (*frozen semen*) dan semen cair;
- f. pelaksanaan pengawasan mutu, pencatatan, pemantauan penggunaan semen beku dan semen cair;
- g. pelaksanaan pengembangan ketersediaan benih dan bibit ternak serta pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah (sumber daya genetic hewan/ternak);
- h. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu genetic ternak (*genetic improvement*);
- i. pelaksanaan peningkatan keterampilan inseminator, pemeriksaan kebuntingan, asisten teknis reproduksi, *recording* dan transfer embrio;
- j. pelaksanaan pelatihan keterampilan peternakan untuk perorangan dan kelompok;
- k. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendamping/fasilitator peternakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi perolehan dan pemanfaatan modal usaha; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD IBI selanjutnya mendapat tugas tambahan dalam pengelolaan ternak ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ternak Ruminansia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator Dinas Peternakan Aceh. Ternak ruminansia dimaksud merupakan ternak milik Pemerintah Aceh yang kewenangannya meliputi:

- Pemeliharaan ternak Ruminansia baik kegiatan pembibitan maupun kegiatan penggemukan;
- Pemenuhan kebutuhan pakan melalui pengadaan pakan, bahan pakan dan HPT;
- Penyediaan Kandang, sarana, prasarana dan peralatan kandang;
- Pelayanan kesehatan hewan dan Perkawinan baik IB maupun kawin alam;
- Pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak;
- Pengeluaran ternak dalam bentuk penjualan, hibah, maupun penghapusan dari aset berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan kebijakan reformasi birokrasi, maka beberapa posisi jabatan struktural eselon IV telah dilakukan penyetaraan ke dalam kelompok jabatan fungsional tertentu pada akhir Desember 2022. Hal ini menyebabkan perubahan nomenklatur dan struktur kedinasan. Adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

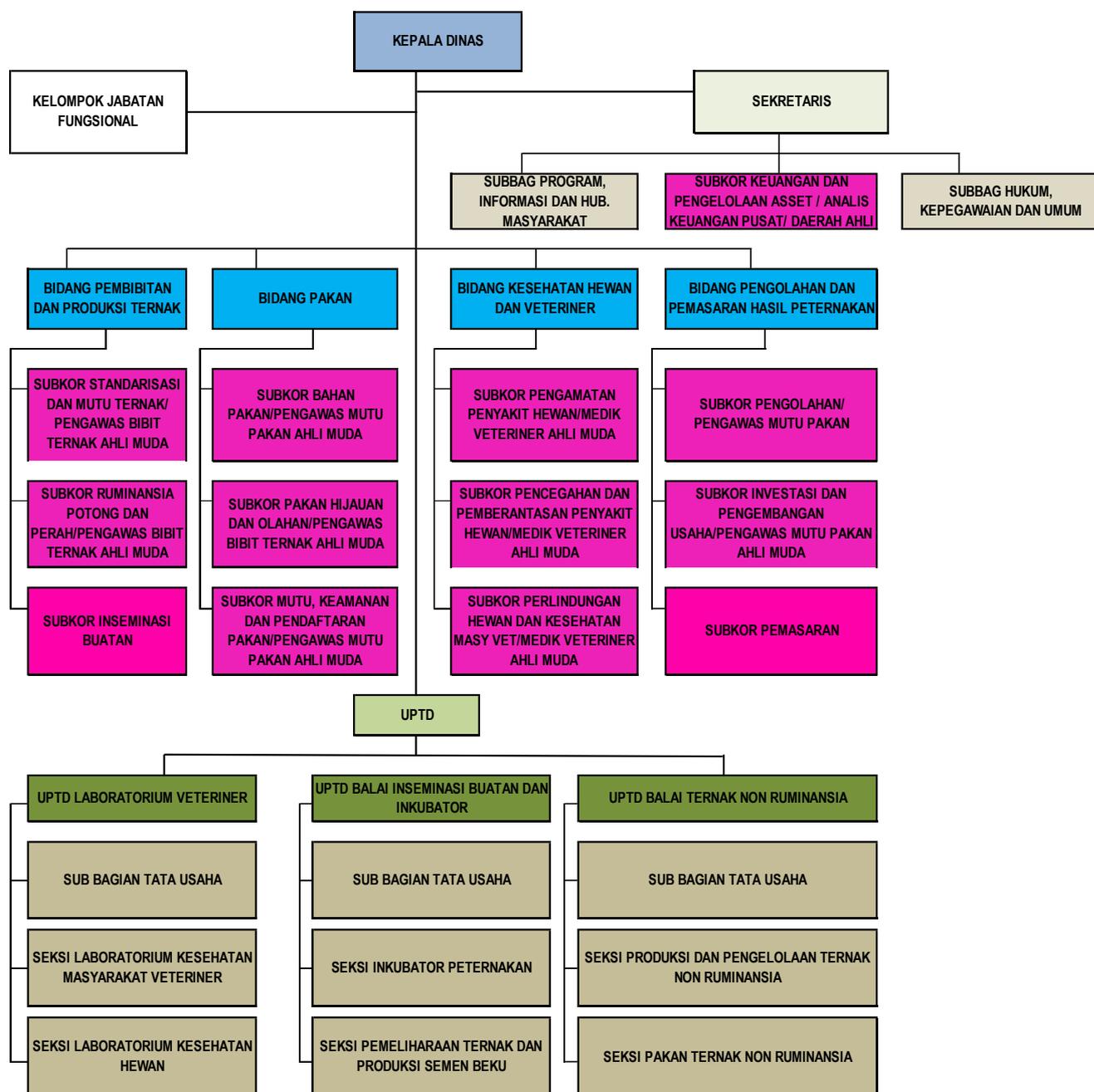
- Subkor Keuangan dan Pengelolaan Asset (Analis Keuangan Pusat/ Daerah Ahli Muda)
- Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
- 2. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri dari :
 - Subkor Standarisasi dan Mutu Ternak (Pengawas Bibit Ahli Muda)
 - Subkor Ruminansia Potong dan Perah (Pengawas Bibit Ahli Muda)
 - Subkor Inseminasi Buatan (Pengawas Bibit Ahli Muda)
- 3. Bidang Pakan, terdiri dari:
 - Subkor Bahan Pakan (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda)
 - Subkor Pakan Hijauan dan Pakan Olahan (Pengawas Bibit Ahli Muda)
 - Subkor Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda)
- 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner terdiri dari :
 - Subkor Pengamatan Penyakit Hewan (Medik Veteriner Ahli Muda)
 - Subkor Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Medik Veteriner Ahli Muda)
 - Subkor Perlindungan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Medik Veteriner Ahli Muda)
- 5. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terdiri dari :
 - Subkor Pengolahan (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda)
 - Subkor Investasi dan Pengembangan Usaha (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda)
 - Subkor Pemasaran

Sementara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tidak mengalami perubahan, yaitu:

 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) terdiri dari: Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kasie Inkubator, dan Kasie Pemeliharaan Ternak dan Produksi Semen Beku;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Veteriner, terdiri dari: Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kasie Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kasie Lab Kesehatan Hewan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR), terdiri dari: Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kasie Produksi dan Pengelolaan Ternak Non Ruminansia, dan Kasie Pakan Ternak Non Ruminansia.

Adapun struktur organisasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN ACEH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Aceh

2.2. Sumber Daya

Jumlah seluruh pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Dinas Peternakan Aceh, per 31 Januari 2022 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang PNS, dan 88 (delapan puluh delapan) orang Tenaga Kontrak. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan PNS yang menduduki Jabatan Struktural, non Struktural, serta Jabatan Fungsional laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Jumlah Pegawai Negari Sipil
Dinas Peternakan Menurut Pangkat/Golongan Per 31 Januari 2022

NO.	PANGKAT/	GOL	JUMLAH			KET
			(Orang)	L	P	
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1	1	-	
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1	
3.	Pembina Tk.I	IV/b	4	1	3	
4.	Pembina	IV/a	33	17	16	
5.	Penata Tk.I	III/d	33	16	17	
6.	Penata	III/c	29	15	14	
7.	Penata Muda Tk.I	III/b	31	16	15	
8.	Penata Muda	III/a	4	3	1	
9.	Pengatur Tk.I	II/d	7	7	-	
10.	Pengatur	II/c	3	3	-	
11.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	1	-	
12.	Pengatur Muda	II/a	-			
13.	Juru Tk.I	I/d	-			
14.	Juru	I/c	-			
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-			
16.	Juru Muda	I/a	-			
	Jumlah		147	80	67	

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2022

Sementara ditinjau dari segi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Peternakan Aceh, maka jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan Aceh
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Per 31 Januari 2022

NO	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH			KET
		S3	S2	S1	D.III	D.IV	SLTA	SLTP	Orang	L	P	
1.	IVd	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
2.	IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
3.	IV/b	-	1	3	-	-	-	-	4	1	3	
4.	IV/a	-	7	26	-	-	-	-	33	17	16	
5.	III/d	1	3	29	-	-	-	-	33	16	17	
6.	III/c	-	2	25	-	2	-	-	29	15	14	
7.	III/b	-	-	25	2	1	3	-	31	16	15	
8.	III/a	-	-	2	1	-	1	-	4	3	1	
9.	II/d	-	-	-	-	-	7	-	7	7	-	
10.	II/c	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	
11.	II/b	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
12.	II/a	-	-	-	-	-	-	-				
13.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-			

14.	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah	1	15	110	3	3	15	0	147	80	67	

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2022

Jika dilihat menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural, maka perbandingan jumlah Pegawai Dinas Peternakan Aceh yang menduduki jabatan Struktural dan Non Struktural antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas Peternakan Aceh yang menduduki jabatan Struktural dan Non Struktural Laki-laki dan Perempuan Per 31 Januari 2022

NO	GOLONGAN	ESSELON								NON STRUKTURAL		JLH
		II		III		IV		V		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1.	IV/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	IV/b	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4
4.	IV/a	-	-	4	2	5	5	-	-	8	9	33
5.	III/d	-	-	-	-	5	3	-	-	11	14	33
6.	III/c	-	-	-	-	1	2	-	-	14	12	29
7.	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	31
8.	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
9.	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
10.	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
11.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	0	4	3	11	10	0	0	64	54	147

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2022

Sedangkan yang menduduki Jabatan Fungsional per Per 31 Januari 2022 pada Dinas Peternakan Aceh ditunjukkan dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Jumlah PNS Dinas Peternakan Aceh yang menduduki jabatan Fungsional Per 31 Januari 2022

No	Jabatan	Golongan									Jml	L	P
		II/d	III/b	III/c	III/d	III/a	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d			
1.	Medik Veteriner Utama										0		
2.	Medik Veteriner Madya						6	2			8	2	6
3.	Medik Veteriner Muda				2		2				4	2	2
4.	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan					1					1	1	
5.	Paramedik Veteriner Trampil Penyelia										0		
6.	Paramedik Veteriner Trampil Pelaksana										0		
7.	Peny. Pertanian Madya								1		1		1
8.	Peny. Pertanian Muda										0		
9.	Peny. Pertanian Pertama										0		
10.	Peny. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda										0		
11.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya						2				2	1	1
12.	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda			2	4						6	5	1
Jumlah		0	0	2	6	1	10	2	1	0	22	11	11

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2022

Dinas peternakan pada periode Renstra ini juga telah mengidentifikasi rencana penyelesaian aset. Aset tersebut meliputi aset yang belum ditemukan fisiknya sebanyak 1.305 unit dengan nilai akumulasi sebesar Rp. 346.112.123,- dan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 42 unit pada tahun 2020 dengan nilai Rp. 81.693.500,-.

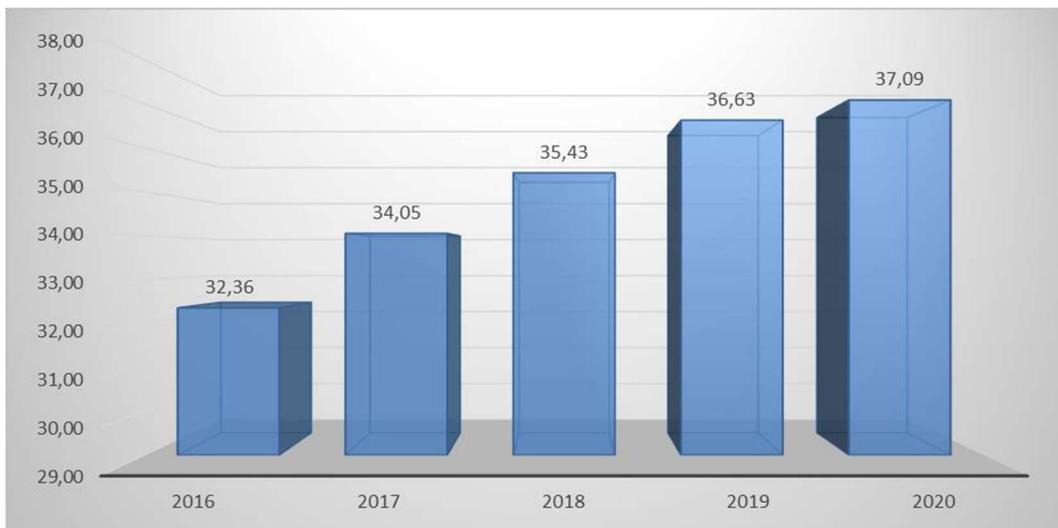
2.3 Kinerja Pelayanan

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas. Pada tahun 2020 s.d Triwulan III- 2021 (y on y) pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kontraksi, kondisi ini akibat dampak dari belum covid-19, sehingga banyak kegiatan ekonomi yang tidak berjalan. Pada tahun 2020 ekonomi Aceh dengan migas tumbuh sebesar -0.37 persen dan -0.74 tanpa migas (y on y). Pada Triwulan I-2020 tumbuh positif baik dengan migas maupun non migas masing-masing sebesar 3.41 persen dan 4.4 persen, hal ini karena di awal tahun 2020 ekonomi masih stabil dan belum merebaknya covid di Indonesia dan di Aceh.

Pada Triwulan II-s.d Triwulan IV-2020 laju pertumbuhan dengan migas mengalami kontraksi masing-masing sebesar -1.66 persen, -0.15 persen dan -2.87 persen dan tanpa migas tumbuh masing-masing sebesar -3.42 persen, -0.85 persen dan -2.91 persen.

Triwulan I-2021 laju pertumbuhan ekonomi ADHK 2010 dengan migas tumbuh negative sebesar -1.90 dan tanpa migas tumbuh positif sebesar -2.08 persen. Selanjutnya pada Triwulan II s.d Triwulan III-2021 pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh positif baik dengan migas maupun non migas. Laju pertumbuhan dengan migas Triwulan II sebesar 2.57 persen dan Triwulan III sebesar 2.81. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada Triwulan II tumbuh sebesar 5.97 persen dan Triwulan III sebesar 2.80 persen,

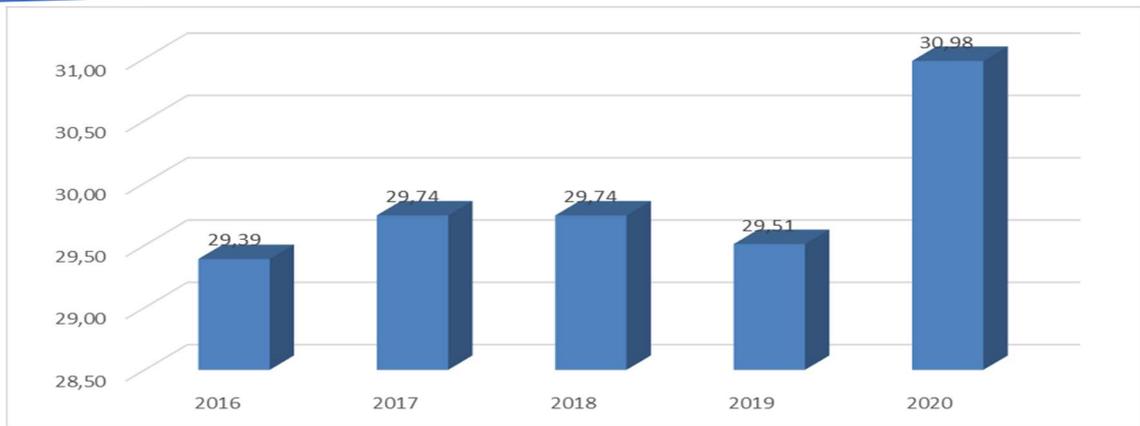
Pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Tahun 2020 berdasarkan laporan PDRB BPS bahwa sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,96 persen. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,98 persen.



Sumber: BPS Aceh. 2020

Gambar 2.2 PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Laju Pertumbuhan perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti, melainkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren positif setiap tahunnya rata-rata pertahun naik 1 persen.



Sumber: BPS Aceh. 2020

Gambar 2.3 Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2015 sebesar 3.89 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 4.11 persen. Peningkatan nilai kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.27 persen yang diakibatkan oleh rendahnya produksi daging ayam petelur.



Sumber: BPS Aceh. 2020

Gambar 2.4 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020

Produksi ternak di Provinsi Aceh umumnya didominasi oleh ternak ruminansia dan unggas. Ternak ruminansia meliputi sapi pedaging, kerbau, kambing dan domba, sementara sapi perah, kuda dan babi terdapat dalam jumlah terbatas dan tersebar hanya di beberapa wilayah kabupaten. Ternak sapi perah dan kuda tidak umum dipelihara oleh masyarakat secara luas, sementara ternak babi dibudidayakan terutama untuk memenuhi kebutuhan warga non muslim. Ternak sapi pedaging yang banyak dijumpai adalah sapi Aceh, sapi Bali, sapi PO dan

sapi silangan hasil IB, sementara sapi Brahman Cross (BX) terdapat dalam jumlah terbatas di beberapa wilayah Aceh seperti Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara.

Ternak kerbau merupakan ternak ruminansia besar potensial kedua setelah ternak sapi pedaging, yang secara tradisional telah lama diusahakan oleh petani. Namun demikian, keberadaan ternak ini cenderung tergeser oleh ternak sapi yang lebih mudah dipelihara dan memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi. Jenis ternak kerbau yang diusahakan masyarakat adalah kerbau rawa dan ternak ini umum dijumpai di padang penggembalaan, kawasan hutan dan lahan sawah. Jenis ternak ruminansia kecil umum dijumpai adalah Kambing Kacang, Kambing Jawarandu dan domba lokal. Ternak ruminansia pedaging tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perayaan keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Qurban, menjelang Ramadhan, megang maupun hajatan keluarga (sunatan, pernikahan, aqiqah).

Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. Nilai tukar petani (NTP) merupakan suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan petani, termasuk peternak. Subsektor Peternakan sebagai salah satu komponen dalam sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi NTP Peternakan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu berada diatas 100, kemudian mengalami penurunan menjadi 97,56 pada tahun 2020, dan menjadi 96,99 pada tahun 2021. Penurunan Rata-rata NTP tahun 2019 disebabkan peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata harga yang diterima petani, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak mulai mengalami peningkatan, karena indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayarkan. Adapun NTP pada subsektor Peternakan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPS Aceh dalam RPA, 2022

Gambar 2.5 Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2015 – 2020

Subsektor Peternakan sebagai salah satu komponen dalam sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi NTP Peternakan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu berada diatas 100, NTPt tahun 2018 mengalami kenaikan lalu kemudian menurun di tahun 2019. Penurunan Rata-rata NTPt tahun 2019 disebabkan peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata harga yang diterima petani, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak mulai mengalami peningkatan, karena indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayarkan.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang diterima petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Hal ini berarti bahwa produksi hasil peternakan yang dihasilkan telah mampu mengimbangi pengeluaran para peternak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan produksi dan harga-harga produk peternakan. Secara rinci indeks harga yang diterima petani dan indeks yang dibayarkan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Perkembangan IH dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2015 – 2020

Tahun	Indeks Harga yang diterima Petani (IH)	Indeks Harga yang dibayar Petani (IB)	NTP Peternak
2015	120.26	119.2	100.89
2016	125.96	122.19	103.12
2017	133.55	126.27	105.76
2018	135.01	130.11	103.76
2019	102.66	105.22	97.56
2020	104.67	107.92	96.99
2021	120.26	119.2	100.89

Sumber: BPS Aceh dalam RPA, 2022

Pada tahun 2019, rata-rata IH adalah 135,01. Pergerakan IH petani subsektor peternakan pada tahun 2019 cenderung sama dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2019, pola IH meningkat hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga akhir tahun. Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun 2019 juga berada pada triwulan dua dan tiga. IH petani subsektor peternakan tahun 2019 mengalami penurunan terbesar pada bulan Desember sebesar 0,81 persen dengan rendahnya harga jual ternak besar (sapi dan

kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba) Sedangkan kenaikan It dengan angka tertinggi terjadi pada Mei 2019 sebesar 2.10 persen dengan tingginya harga jual komoditas daging menyambut tradisi Meugang dan Idul Fitri.

Pada tahun 2018, rata-rata Ib adalah 126.27. Pola Ib pada tahun 2018 ini terus meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2019, rata-rata IB adalah 130.11. Selama tahun 2019, pola Ib cenderung meningkat hingga Agustus menurun hingga akhir tahun, Pola perubahan Ib mengikuti Indeks Kelompok Konsumsi Rumah tangga (KRT). Selama tahun 2019, Ib meningkat paling tinggi pada Mei yang disebabkan meningkatnya indeks KRT. Kelompok bahan makanan memang mengalami inflasi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sedangkan penurunan dengan angka tertinggi terjadi pada September 2019 dengan rendahnya indeks KRT. KRT mengalami deflasi dengan menurunnya harga pada kelompok bahan makanan seperti komoditas ikan, cabe merah dan bawang.

Pada Desember 2020, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPt) sebesar 96.75 atau mengalami penurunan 0,84 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) turun sebesar 0,01 persen dengan rendahnya harga jual komoditas ternak besar (sapi) dan ternak kecil (kambing dan domba). Indeks yang dibayar petani Ib naik sebesar 0,84 persen dengan naiknya indeks kelompok KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,52 persen. Selain faktor eksternal diatas, beberapa faktor internal juga dapat dipengaruhi guna peningkatan kesejahteraan peternak. Dari sisi konsumsi rumah tangga masih sangat dominan dengan konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan transportasi dan komunikasi, dengan nilai rata-rata yang lebih besar daripada indeks yang diterima petani. Selanjutnya dari sisi biaya produksi dan penambahan barang modal telah menunjukkan nilai yang lebih kecil dari indeks terimanya, kecuali pada biaya transportasi. Biaya produksi dapat terus ditekan dengan peningkatan diversifikasi produk peternakan dan integrasi peternakan dan pertanian misalnya dalam pengolahan pupuk dan pakan ternak.

Secara detail tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2017-2022, menurut indikator kinerja utama sebagaimana Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Aceh (TC-23)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Nilai Tukar peternak			Indeks	100,00	101,02	101,05	101,07	102,02	100,00	96,95	97,27	96,99	99,03	1,00	0,96	0,96	0,96	0,97
I	Indeks terima peternak (It)			Indeks	100,00	133,82	140,51	147,54	154,92	100,00	100,35	102,05	104,67	105,11	1,00	0,75	0,73	0,71	0,68
II	Indeks bayar peternak (Ib)			Indeks	100,00	135,18	141,99	149,12	158,05	100,00	103,5	104,91	107,92	106,14	1,00	0,77	0,74	0,72	0,67
1	Peningkatan Produksi daging Ruminansia			Ton	17.657,00	19.469,00	20.442,00	21.464,00	22.537,00	14.054,00	15.577,66	19.316,78	17.844,53	21.464,00	0,80	0,80	0,94	0,83	0,95
2	Peningkatan Produksi daging Unggas			Ton	22.834,00	23.976,00	25.175,00	26.434,00	27.756,00	18.720,00	43.088,65	41.672,33	51.353,00	45.371,33	0,82	1,80	1,66	1,94	1,63
3	Peningkatan Produksi Telur			Ton	20.467,00	21.490,00	22.565,00	23.693,00	24.878,00	16.270,00	22.663,74	23.375,48	28.624,00	24.878,00	0,79	1,05	1,04	1,21	1,00
4	Peningkatan Produksi Susu			Ton	108,00	113,00	119,00	125,00	131,00	38,00	59,00	8,80	0,30	1,50	0,35	0,52	0,07	0,00	0,01
5	Penurunan Morbiditas (Angka Kesakitan) terhadap Agen																		
	- Bakteri			%	20,90	18,81	16,93	15,24	13,72	21,61	18,3	12,33	19,05	13,72	1,03	0,97	0,73	1,25	1,00
	- Parasit			%	35,81	32,23	29,01	26,52	23,87	29,54	48,52	59,54	57,3	23,87	0,82	1,51	2,05	2,16	1,00
	- Protozoa			%	0,40	0,32	0,29	0,26	0,23	0,37	0	0	0	0	0,93	-	-	-	-
	- Virus			%	27,37	24,63	22,17	19,95	17,95	40,73	24,69	20,86	14,66	17,95	1,49	1,00	0,94	0,73	1,00

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, untuk masing-masing indikator kinerja pelayanan Dinas Peternakan Aceh dapat dijelaskan bahwa produksi hasil peternakan yang terdiri dari daging, telur, dan susu sebagaimana ditunjukkan indikator nomor 1 dan 2. Pencapaian target Produksi daging masih relatif baik meskipun sedikit mengalami penurunan dua tahun terakhir. Secara lebih detil trend produksi daging berdasarkan jenis ternak dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7 Produksi Daging Aceh Tahun 2019-2021

No	Jenis Ternak	Daging (kg)			Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021*)	2019-2020	2020-2021
1	Sapi potong lokal	10.416.200	12.927.761	12.943.976	24,11	0,13
2	Kerbau Potong/Perah	2.517.380	2.388.563	2.418.750	-5,12	1,26
3	Kambing Potong/Perah	2.209.483	1.946.250	1.984.425	-11,91	1,96
4	Domba	373.280	350.550	361.000	-6,09	2,98
5	Babi	61.319	129.501	133.390	111,19	3,00
6	Ayam Buras	3.893.891	10.436.548	9.991.790	168,02	-4,26
7	Ayam Ras Petelur	-	304.591	307.287	100,00	0,89
8	Ayam ras Pedaging	36.748.000	34.437.000	42.669.723	-6,29	23,91
9	Itik	1.296.911	1.119.241	1.129.146	-13,70	0,89
10	Itik Manila	350.516	398.970	395.932	13,82	-0,76
11	Puyuh	10.884	9.423	9.490	-13,42	0,72
12	Kelinci	3.010	2.906	2.984	-3,45	2,67
Jumlah		57.880.874	64.451.303	72.347.894	29,76	2,78

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, produksi daging berasal dari 12 komoditas ternak penghasil daging, yaitu : sapi potong lokal; kerbau potong/perah; kambing potong/perah; domba; babi; ayam buras; ayam ras petelur; ayam ras pedaging; itik; itik manila, puyuh, dan kelinci,. Komoditas ternak utama penghasil daging adalah ayam ras pedaging dan sapi potong.

Tabel 2.8 Produksi Telur Aceh Tahun 2019-2021

No	Jenis Ternak	Telur (kg)			Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021*)	2019-2020	2020-2021
1	Ayam Buras	6.195.690,00	11.133.482,31	10.659.023,98	79,70	-4,26
2	Ayam Ras Petelur	9.160.000,00	2.426.815,03	2.448.304,61	-73,51	0,89
3	Itik	7.508.048,00	7.113.988,05	7.176.948,40	-5,25	0,89
4	Itik Manila	N/A	2.535.880,02	2.516.574,65	N/A	-0,76
5	Puyuh	N/A	97.084,62	97.777,20	N/A	0,71
Jumlah		22.863.738,00	23.307.250,03	22.898.628,84	0,19	-0,51

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.8 produksi telur berasal dari 5 komoditas ternak penghasil telur, yaitu ayam buras; ayam ras petelur; itik; itik manila; dan burung puyuh. Komoditas ternak utama penghasil telur adalah ayam ras petelur.

Jumlah populasi ternak juga menjadi indikator pencapaian pembangunan sektor peternakan. Perkembangan jumlah populasi ternak pada tahun 2021 Provinsi Aceh terdiri atas ternak besar yang meliputi sapi potong 452.284 ekor, sapi perah 28 ekor dan kerbau 104.706 ekor, serta ternak kecil yang terdiri atas kambing 642.191 ekor, kambing perah 735 ekor, domba 102.883 ekor, babi 2.014 ekor dan kuda 2.916 ekor.

Tabel 2.9 Populasi dan Penyebaran Ternak Ruminansia di Provinsi Aceh Tahun 2021

NO	Kab/Kota	Sapi potong Lokal	Sapi Perah	Kerbau Potong	Kambing Potong	Kambing Perah	Domba	Babi
1	Simeulue	3.130		11.000	2.743			
2	Aceh Singkil	4.225		380	3.585		553	250
3	Aceh Selatan	1.997		3.830	21.855		4.698	
4	Aceh Tenggara	4.860		580	11.842		200	1.500
5	Aceh Timur	41.658		5.671	75.845		12.034	
6	Aceh Tengah	5.480	14	6.025	16.280	170	426	
7	Aceh Barat	930		24.502	12.480		958	
8	Aceh Besar	82.135	6	12.456	60.362		4.178	
9	Pidie	58.006		2.800	115.010	42	6.525	
10	Bireuen	55.430		1.950	45.536		19.620	
11	Aceh Utara	56.304		4.580	105.250		18.700	
12	Aceh Barat Daya	2.899		4.350	11.258		800	
13	Gayo Lues	8.167	4	6.725	7.971	130	4.720	
14	Aceh Tamiang	47.637		165	42.110	160	16.823	
15	Nagan Raya	12.159		8.948	13.750		1.200	
16	Aceh Jaya	22.508		5.206	30.050		850	
17	Bener Meriah	822	4	2.310	4.812		1.178	
18	Pidie Jaya	22.464		2.750	20.256		3.600	
19	Kota Banda Aceh	1.873		30	7.323	130	145	
20	Kota Sabang	2.027		38	3.502		15	
21	Kota Langsa	7.392		228	8.743	65	1.000	
22	Kota Lhokseumawe	7.636		40	15.200	38	2.870	
23	Kota Subulussalam	2.545		142	6.428		1.790	290
	Jumlah	452.284	28	104.706	642.191	735	102.883	2.040

Sumber: BPS Aceh, 2021

Populasi ternak tidak menyebar secara merata di setiap wilayah Provinsi Aceh. Pusat pertumbuhan sapi potong dengan populasi tertinggi terletak pada Kabupaten Aceh Besar dengan populasi 82.135 ekor, selanjutnya disusul oleh kabupaten Pidie dengan populasi 58.006 ekor, Aceh Utara populasi 56.304 ekor, Bireuen dengan populasi 55.430 ekor dan Aceh Tamiang populasi 47.637 ekor. Sentra pengembangan populasi ternak kerbau terdapat di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar dan Simeulue, dengan populasi masing-masing sebesar 24.502 ekor, 12.456 ekor dan 11.000 ekor. Ternak kambing banyak dijumpai di Kabupaten Pidie dengan populasi 115.010 ekor, Aceh Utara 105.250 ekor, Aceh Timur 75.845 ekor dan Aceh Besar sebesar 60.362 ekor.

Sementara, sentra populasi ternak domba banyak dijumpai di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Tamiang dengan populasi masing-masing sebesar 19.620 ekor, 18.700 ekor, dan 16.823 ekor. Ternak babi banyak dijumpai di Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil dengan populasi masing-masing 1.500 ekor, 290 ekor, dan 250 ekor (Tabel 2.9).

Capaian target fisik pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun 2021 secara keseluruhan per 31 Desember 2021 untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dapat direalisasikan sebesar 38.920 ekor atau 102,33% dari yang ditargetkan sebesar 38.033 ekor. Adapun rincian realisasi IB pada masing-masing Kabupaten/kota ditampilkan dalam tabel 2.10.

Tabel 2.10. Target dan Realisasi IB Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Persen (%)
1	Aceh Selatan	130	157	120,77
2	Pidie	700	839	119,86
3	Aceh Barat Daya	115	133	115,65
4	Aceh Tengah	560	620	110,71
5	Pidie Jaya	900	970	107,78
6	Banda Aceh	400	429	107,25
7	Bireuen	6.380	6.694	104,92
8	Aceh Tamiang	7.570	7.826	103,38
9	Aceh Utara	2.200	2.265	102,95
10	Aceh Besar	9.725	9.983	102,65
11	Aceh Timur	2.800	2.863	102,25
12	Langsa	2.600	2.635	101,35
13	Subulussalam	470	468	99,57
14	Bener Meriah	150	146	97,33
15	Kota Sabang	400	378	94,50
16	Lhokseumawe	1.250	1.158	92,64
17	Aceh Tenggara	183	167	91,26
18	Gayo Lues	540	491	90,93
19	Aceh Barat	100	82	82,00
20	Nagan Raya	340	271	79,71
21	Aceh Singkil	100	79	79,00
22	Aceh Jaya	320	207	64,69
23	Simeulue	100	59	59,00
TOTAL		38.033	38.920	102,33

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2021

Secara umum capaian realisasi IB hampir disemua kabupaten/kota telah memenuhi target yang ditetapkan kecuali di Kab. Simeulue, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Singkil, Kab. Nagan Raya

dan Kab. Aceh Barat. Sementara Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dapat direalisasikan sebesar 24.161 ekor atau 153,43% dari yang ditargetkan sebesar 15.747 ekor. Adapun rincian realisasi PKB pada masing-masing Kabupaten/kota ditampilkan dalam tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Target dan Realisasi PKB Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Persen
1	Aceh Tenggara	92	181	196,74
2	Aceh Tamiang	3.785	7.065	186,66
3	Aceh Utara	946	1.692	178,86
4	Nagan Raya	170	303	178,24
5	Gayo Lues	270	478	177,04
6	Lhokseumawe	625	1.097	175,52
7	Subulussalam	188	315	167,55
8	Kota sabang	160	255	159,38
9	Langsa	1.040	1.608	154,62
10	Aceh Besar	4.085	5.926	145,07
11	Aceh Tmur	1.120	1.589	141,88
12	Aceh Jaya	160	225	140,63
13	Banda Aceh	160	211	131,88
14	Aceh Barat	43	51	118,60
15	Bener Meriah	65	76	116,92
16	Pidie	266	307	115,41
17	pidie Jaya	450	518	115,11
18	Simeulue	60	68	113,33
19	Bireuen	1.722	1.891	109,81
20	Aceh Tengah	224	244	108,93
21	Aceh Barat Daya	40	33	82,50
22	Aceh Selatan	46	25	54,35
23	Aceh Singkil	30	3	10,00
TOTAL		15.747	24.161	153,43

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2021

Realisasi pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan (PKB) pada tahun 2021 juga menunjukkan capaian yang baik, dimana terdapat hanya 3 kabupaten saja yang belum memenuhi target yaitu Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Selatan dan Kab. Aceh Barat Daya. Hal yang sama juga terjadi pada capaian Kelahiran, dimana angka kelahiran ternak dapat direalisasikan sebesar 23.913 ekor atau 122,24% dari yang ditargetkan sebesar 19.562 ekor. Adapun rincian realisasi kelahiran ternak pada setiap Kabupaten/kota ditampilkan dalam tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12. Target dan Realisasi Kelahiran

No.	Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Persen
1	Pidie	308	575	186,69
2	Aceh Tengah	252	397	157,54
3	Aceh Tamiang	4.164	6.097	146,42
4	Aceh Tenggara	82	119	145,12
5	Banda Aceh	180	261	145,00
6	Nagan Raya	255	359	140,78
7	Aceh Barat Daya	52	73	140,38
8	Gayo Lues	243	341	140,33
9	Aceh Timur	1.792	2.511	140,12
10	Aceh Barat	65	86	132,31
11	Aceh Jaya	144	189	131,25
12	Langsa	1.560	1.935	124,04
13	Lhokseumawe	688	838	121,80
14	Aceh Utara	990	1.167	117,88
15	Aceh Besar	4.863	5.508	113,26
16	Bener Meriah	83	91	109,64
17	Aceh Singkil	75	82	109,33
18	Subulussalam	212	203	95,75
19	Bireuen	2.866	2.646	92,32
20	Kota Sabang	180	142	78,89
21	Aceh Selatan	58	40	68,97
22	Pidie Jaya	405	230	56,79
23	Simeulue	45	23	51,11
TOTAL		19.562	23.913	122,24

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2021

Secara keseluruhan, komposisi komoditi ternak yang dilahirkan dan persentase pertumbuhannya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dirincikan pada tabel 2.13 terlihat kelahiran komoditi sapi aceh dan kerbau mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, yaitu masing-masing 1,92 dan 1,87 persen. Sementara komoditi lainnya mengalami penurunan, seperti sapi persilangan, sapi perah dan kambing.

Tabel 2.13
 Persentase Kelahiran Ternak Ruminansia Provinsi Aceh Tahun 2017-2020
 berdasarkan komoditi

NO	Bangsa Ternak	Jumlah Kelahiran				Komposisi (%)				Pertumbuhan (%)		
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017-2018	2018-2019	2019-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sapi Aceh	5.022	12.169	9.512	27.773	50,20	38,76	26,84	78,36	1,42	-0,22	1,92
2	Sapi Non Aceh	4.787	18.544	25.369	8.742	47,86	59,07	71,58	24,67	2,87	0,37	-0,66
3	Sapi Perah	16	42	17	10	0,16	0,13	0,05	0,03	1,63	-0,60	-0,41
4	Kerbau	178	637	540	1.549	1,78	2,03	1,52	4,37	2,58	-0,15	1,87
5	Kambing	-	1	4	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3,00	-1,00
Jumlah		10.003	31.393	35.442	38.074	100,00	100,00	100,00	107,43	2,14	0,13	0,07
Peningkatan			21.390	4.049	2.632						-2,01	-0,35

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2021

Ternak unggas yang diusahakan masyarakat meliputi ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik dan puyuh. Ayam ras pedaging dan petelur merupakan ternak unggas yang secara komersial diusahakan untuk memenuhi kebutuhan akan daging dan telur unggas bagi masyarakat. Akan tetapi populasi ayam ras petelur masih terbatas, tidak sebanyak ayam ras pedaging. Ayam lokal, itik dan puyuh banyak dibudidayakan oleh masyarakat walaupun umumnya masih dalam skala subsisten.

Oleh karenanya, perkembangan usaha peternakan ternak non ruminansia di Provinsi Aceh masih belum cukup menggembirakan. Ketergantungan sarana produksi dari Provinsi Sumatera Utara membuat investor swasta enggan berinvestasi di bidang ini. Belum ada satu pun perusahaan ayam ras petelur skala besar untuk memproduksi telur di Aceh. Sementara bahan baku pakan ternak terutama jagung dan dedak tersedia dalam jumlah yang melimpah dan hingga saat ini sebahagian besar dikirim ke pabrik pakan ternak di Sumatera Utara, yang kemudian sebagian besar hasil produksi pakannya dijual kembali ke Aceh. Hingga saat ini ketergantungan terhadap sektor ini dari Sumatera Utara belum ada tanda-tanda akan berakhir, malah sebaliknya ketergantungan terhadap peternakan ayam petelur dan industri pakan ternak dari provinsi tetangga semakin kuat. Hal ini disebabkan peternakan ayam petelur masih skala kecil di Aceh sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang, karena secara prinsip ekonomi semakin besar skala usaha akan semakin ekonomis dan efisien dan dijalankan dengan konsep manajemen profesional.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah sudah sepatutnya melakukan investasi di bidang ternak non ruminansia sampai usaha tersebut menarik minat bagi investor swasta, dan pada saatnya nanti berangsur-angsur investasi pemerintah dapat dikurangi atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta seperti yang diamanatkan dalam Pergub Aceh Nomor 20 Tahun 2009, sebagaimana pada usaha ayam ras pedaging, dimana pemerintah tidak lagi terlibat secara langsung dan hanya membimbing, mengawasi dan mengatur regulasinya, sehingga antara peternak dengan perusahaan mitra dapat berjalan seiring dan saling menguntungkan. Adapun populasi ternak unggas meliputi ayam buras 4.765.620 ekor, ayam ras pedaging 32.084.620 ekor, ayam ras petelur 734.506 ekor, itik sebesar 1.737.232 ekor, itik m a n i l a sebesar 609.155 ekor dan puyuh sebesar 95.860 ekor serta kelinci puyuh sebesar 6.363 ekor.

Tabel 2.14 Populasi dan Penyebaran Ternak Unggas di Provinsi Aceh Tahun 2021

NO	Kab/Kota	Kuda	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam ras Pedaging	Itik	Itik Manila	Puyuh	Kelinci
1	Simeulue		16.280		3.680	650			
2	Aceh Singkil		11.400		19.800	16.100	636	2.705	8
3	Aceh Selatan		350.425	12.500	510.558	39.717	30.340	4.028	
4	Aceh Tenggara	115	27.400		80.450	45.000	8.250		
5	Aceh Timur		190.100	279.832	1.352.720	70.500	12.250		
6	Aceh Tengah	1.900	58.000		212.845	77.400			
7	Aceh Barat		116.000	370	1.986.250	38.500	15.175	1.725	38
8	Aceh Besar	25	572.450	360.052	4.230.456	126.780	2.300	5.232	
9	Pidie		950.000		1.320.152	370.015	160.250	2.740	
10	Bireuen		210.231	16.850	1.250.400	120.500	112.953	33.905	3.820
11	Aceh Utara		1.100.000	47.287	15.347.449	335.506	120.526	4.200	820
12	Aceh Barat Daya		215.670	49	64.824	55.650	18.500	3.570	
13	Gayo Lues	365	93.814		340.381	70.720			
14	Aceh Tamiang		134.250	2.122	65.720	16.234	610	13.865	50
15	Nagan Raya		18.400	6.887	230.120	2.500	38.100	1.900	
16	Aceh Jaya	7	86.750		745.600	50.250			
17	Bener Meriah	478	60.250		220.216	15.546			165
18	Pidie Jaya		147.820		752.962	98.450	31.200	780	820
19	Kota Banda Aceh		73.250			21.926	10.620		
20	Kota Sabang		44.820		78.782	3.487			
21	Kota Langsa	19	164.500		2.620.312	60.700	45.210	19.425	65
22	Kota Lhokseumawe		86.000	5.125	310.523	98.981			575
23	Kota Subulussalam	7	37.810	3.432	340.420	2.120	2.235	1.785	2
	Jumlah	2.916	4.765.620	734.506	32.084.620	1.737.232	609.155	95.860	6.363

Sumber: BPS Aceh, 2021

Dari Tabel 2.14, ayam ras di Provinsi Aceh masih didominasi oleh ayam ras pedaging dengan total populasi sebesar 32.084.620 ekor dengan sentra-sentra pertumbuhan terdapat di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar dan Kota Langsa dengan populasi masing-masing sebesar

15.347.449 ekor, 4.230.456 ekor dan 2.620.312 ekor. Sementara ayam buras dengan total populasi sebesar 4.765.620 ekor dengan pusat pertumbuhan terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan populasi 1.100.000 ekor dan Pidie dengan populasi 950.000 ekor dan sedangkan sisanya menyebar di seluruh kabupaten. Sementara populasi ayam ras petelur tercatat sebesar 734.506 ekor dan terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Timur dengan populasi masing-masing mencapai 360.052 ekor dan 279.832 ekor. Populasi ternak itik dan puyuh di Provinsi Aceh yaitu sebesar 1.737.232 ekor, 609.155 ekor, 63.619 ekor. Kawasan penyebaran ternak itik terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Besar dengan populasi itik dan itik manila masing-masing sebesar 370.015 ekor dan 160.250 ekor. Sementara Kawasan penyebaran ternak puyuh terkonsentrasi di Kabupaten Bireuen dengan populasi 33.905. sedangkan komoditas ternak Kuda yang masuk dalam kategori Ternak Non Ruminansia terpusat di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues dengan populasi masing-masing 1.900 ekor, 478 ekor dan 365 ekor.

Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan angka kesakitan yang tinggi pada hewan. Penyakit pada hewan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, penyakit ternak tidak hanya menyerang ternak tetapi juga dapat menular ke manusia. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan selama tahun 2021 telah dilaksanakan secara terkoordinir dibantu sepenuhnya oleh Petugas Kesehatan Hewan di masing-masing Dinas kabupaten/kota serta petugas kecamatan dan petugas puskesmas yang tersebar di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh. Dari hasil kegiatan pengamatan penyakit didapati sejumlah penyakit hewan menular terdapat 10 jenis yang ada di temui di Provinsi Aceh yaitu : Rabies, New Castle Disease (ND), Brucellosis, Salmonellosis, Bovine Viral Diarrhea (BVD), Septicaemia Epizootica (SE), Malignant Catarrhal Fever (MCF), Orf, Surra dan Pink Eye.

Jumlah kasus penggigitan oleh hewan penular Rabies yang diperoleh dari data *Rabies Centre* terdapat sebanyak 79 kasus yang terjadi di 2 Kabupaten/Kota yaitu Banda Aceh sebanyak 64 kasus dan Aceh Besar sebanyak 34 Kasus. Sementara jumlah kasus ND mencapai 5.495 kasus, dengan kasus terbanyak terjadi di Pidie sebanyak 4.642 kasus, Aceh Jaya sebanyak 138 kasus, Aceh Barat sebanyak 367, Aceh Selatan sebanyak 265 kasus dan Simeulue sebanyak 83 kasus. Selain itu, kasus *Brucellosis* tercatat 90 kasus yang terdapat di Bireuen berjumlah 2 kasus dan di Aceh Timur sebanyak 65 kasus, kabupaten Nagan Raya 9 kasus dan Aceh Barat Daya berjumlah 14 kasus. Selanjutnya adalah Jumlah kasus penyakit SE terjadi sebanyak 929 kasus terjadi di 4 Kabupaten/kota, dengan kasus terbanyak terdapat di Singkil sebanyak 812 kasus, Simeulue sebanyak 117 kasus, Langsa 20 kasus dan Nagan Raya sebanyak 121 kasus. Rekapitulasi jenis kasus penyakit hewan pada tahun 2020-2021 disajikan dalam tabel 2.15.

Tabel 2.15 Rekapitulasi Jenis Kasus Penyakit Hewan Menular Strateis di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021

No.	Jenis Penyakit (Jumlah Kasus)	Tahun		Pertumbuhan (%)
		2020	2021	
1	AT	-	-	-
2	BR	3	90	2.900,00
3	BVD	962	70	- 92,72
4	GB	-	1	100,00
5	DA	940	5.926	530,43
6	IBR	-	-	-
7	JA	-	-	-
8	ND	13.526	7.705	- 43,04
9	RA	-	-	-
10	SAL	140	43	- 69,29
11	SE	226	1.570	594,69
12	AI	-	-	-
13	PE	11.208	12.137	8,29
14	ORF	7.388	8.771	18,72
15	P.Int	20.768	22.978	10,64
16	P. Eks	5.821	7.980	37,09
17	Pul	-	-	0
18	MCF	23	28	21,74
19	SC	35.763	33.369	- 6,69
20	SA	10	7	- 30,00
JUMLAH		96.778	100.675	4,03

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2021

Pelayanan kesehatan hewan dilakukan pada 102 Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang aktif tersebar di 23 kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16 Rekapitulasi Puskesmas di Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PUSKESWAN	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	KOTA SABANG	2	1	1	-
2	KOTA BANDA ACEH	9	2	2	-
3	KAB. ACEH BESAR	23	11	11	-
4	KAB. PIDIE	23	5	5	-

5	KAB. PIDIE JAYA	8	4	4	-
6	KAB. BIREUEN	17	8	8	-
7	KAB. ACEH UTARA	27	12	12	-
8	KOTA LHOKSEUMAWE	4	2	2	-
9	KAB. ACEH TIMUR	24	6	6	-
10	KOTA LANGSA	5	2	2	-
11	KAB. ACEH TAMIANG	12	4	4	-
12	KAB. BENER MERIAH	7	6	4	2
13	KAB. ACEH TENGAH	14	5	5	-
14	KAB. GAYO LUES	11	3	2	1
15	KAB. ACEH TENGGARA	16	3	3	-
16	KAB. ACEH JAYA	9	7	7	-
17	KAB. ACEH BARAT	12	4	4	-
18	KAB. NAGAN RAYA	8	5	5	-
19	KAB. ACEH BARAT DAYA	9	3	3	-
20	KAB. ACEH SELATAN	16	4	4	-
21	KAB. SIMEULUE	8	4	4	-
22	KOTA SUBULUSSALAM	5	1	1	-
23	KAB. ACEH SINGKIL	10	3	3	-
JUMLAH		279	105	102	3

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2021

Sumberdaya pakan utama bagi ternak ruminansia, khususnya sapi dan kambing di Provinsi Aceh adalah hijauan pakan yang bersumber dari padang penggembalaan alam dan sumber pakan hijauan lainnya yang berintegrasi dengan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sumber pakan ternak utama yang lazim digunakan berupa hijauan alam yang berupa rumput alam dan beberapa jenis leguminosa. Beberapa jenis leguminosa yang tumbuh subur dan potensial untuk dijadikan pakan ternak seperti *Gliricidia sepium* (gamal), *Bauhinia sp.* (daun kupu-kupu), *Arachis hipogaea* (kacang tanah), *Centrosema pubescens*, *Calopogonium mucunoides*, *Leucaena leucocephala* (Lamtoro).

Sementara, peternak di wilayah tersebut umumnya pemanfaatan sumber pakan lain sebagai pakan tambahan masih sangat terbatas. Limbah pertanian, seperti jagung relatif sudah dikenal baik dan dimanfaatkan sebagai sumber pakan. Beberapa jenis limbah yang dihasilkan dalam jumlah terbatas, seperti daun kacang tanah dan kacang kedelai masih belum banyak dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak. Limbah lain yang berasal dari

perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan, seperti byproduct dari sawit, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal. Beberapa faktor yang menjadikan pemanfaatan bahan-bahan tersebut masih terbatas, yaitu 1) kurangnya pengetahuan peternak dalam pemeliharaan ternak serta sistem pemeliharaan ternak yang sangat tergantung dari rumput alam yang berasal dari padang penggembalaan alam, 2) hasil ikutan pertanian belum dimanfaatkan karena terbatasnya pengetahuan peternak dalam pemanfaatan limbah dari tanaman pangan dan perkebunan seperti padi, jagung, kacang tanah, singkong, ubi jalar, dan kelapa sawit dan kelapa, karet, kopi dan kakao (coklat). Pengembangan areal tanaman pangan dan perkebunan kedepan dapat menyediakan bahan pakan penguat yang sangat potensial yang berasal dari hasil ikutan agroindustri pertanian dan perkebunan, seperti dedak padi, ampas tahu, bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa, kulit buah coklat, kulit kopi dan lain sebagainya.

Luasan penanaman komoditi perkebunan sebagai sumber hijauan pakan di Provinsi Aceh juga melimpah. Komoditi perkebunan yang ditanam sebagai sumber hijauan berada di bawah tegakan tanaman kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao. Tanaman kelapa sawit mempunyai luasan yang paling tinggi sebagai sumber hijauan pakan, yang kemudian diikuti dengan tanaman karet dan kelapa. Demikian juga luasan penanaman komoditi pertanian sebagai sumber hijauan pakan di Provinsi Aceh. Komoditi pertanian yang ditanam sebagai sumber hijauan adalah limbah dari tanaman padi sawah, padi ladang dan jagung dalam bentuk jerami. Luasan penanaman padi sawah tertinggi pada Kabupaten Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, dan Bireuen. Luasan penanaman tanaman padi ladang tertinggi di Kabupaten Aceh Timur. Luasan penanaman jagung tertinggi pada Kabupaten Aceh Tenggara. Bagi ternak, pakan digunakan oleh ternak untuk kebutuhan hidup pokok, pertumbuhannya, serta untuk menunjang kesehatan dan reproduksi ternak. Oleh karena itu pakan ternak harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik serta kandungan nutrisi yang seimbang. Dengan pemberian pakan yang baik, ternak akan menghasilkan produksi yang tinggi.

Pengembangan ternak potong membutuhkan pakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat dalam jumlah yang cukup. Provinsi Aceh memiliki potensi dalam pengembangan pembibitan sapi potong dan penggemukan. Hal ini ditunjang dengan populasi ternak potong yang tersebar di hampir semua kabupaten/kota, serta ketersediaan hijauan dari limbah perkebunan sawit. Provinsi Aceh memiliki potensi yang cukup besar sebagai penghasil sumber bahan pakan konsentrat yang berasal dari limbah perkebunan sawit, limbah perkebunan kopi, limbah perkebunan kakao serta limbah tanaman pangan seperti padi.

Perkebunan kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman tropik yang penting dan berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pengembangan

perkebunan kelapa sawit terus meningkat setiap tahunnya, sehingga perkebunan kelapa sawit merupakan industri pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap sektor pertanian serta memberikan. Pengembangan perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tentunya memberikan konsekuensi yang positif pula terhadap ketersediaan biomasa bahan pakan lokal cukup besar bagi ternak. Peningkatan areal kelapa sawit di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan mendorong berkembangnya industri pengolahan buah sawit dalam menghasilkan produk pangan maupun non pangan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perkebunan sawit yang cukup luas yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten terluas yang memiliki perkebunan sawit adalah Kabupaten Nagan Raya diikuti oleh Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang tidak memiliki perkebunan sawit. Perkebunan sawit juga memiliki potensi dalam menghasilkan hijauan pakan sebagai produk samping. Hijauan pakan yang dapat dimanfaatkan dari perkebunan sawit adalah berupa daun dan pelepah sawit, serta rumput yang tumbuh diantara tanaman sawit. Hijauan rumput yang dapat dimanfaatkan adalah berasal perkebunan sawit yang telah berumur lebih dari 4 tahun, tanaman ini sudah relatif tinggi sehingga tidak terganggu oleh keberadaan sapi.

Hasil utama pabrik pengolahan kelapa sawit adalah CPO (Crude Palm Oil). Produk ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga diekspor ke luar negeri sebagai komoditas unggulan Indonesia. Pengolahan kelapa sawit menghasilkan produk samping yaitu bungkil inti sawit (BIS) dan lumpur sawit (sludge/solid). Kedua bahan pakan ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. CPO dan bungkil inti sawit sudah umum digunakan sebagai pakan ternak baik untuk ternak unggas maupun ruminansia. Dalam pengolahan kelapa sawit akan dihasilkan sekitar 23% CPO, serta akan dihasilkan bungkil inti sawit sebanyak 3% dan lumpur sawit sebanyak 4% sebagai hasil samping. Selain itu akan dihasilkan serat dan tandan sawit yang juga dimanfaatkan sebagai sumber serat.

Berdasarkan data produksi sawit dapat diperkirakan produksi bungkil inti sawit dan lumpur sawit di Provinsi Aceh. Berdasarkan data statistik tahun 2016, Provinsi Aceh menghasilkan kelapa sawit sebanyak 762,450 ton/tahun. Diperkirakan produksi hasil samping berupa bungkil inti sawit diperkirakan sebanyak 22,874 ton/tahun sedangkan lumpur sawit sebanyak 30,498 ton/tahun. Ketersediaan limbah pengolahan sawit ini tersebar di hampir seluruh kabupaten di Provinsi Aceh. Namun demikian sebagian besar BIS diekspor ke luar negeri, sehingga hal ini merupakan kendala dalam pemanfaatan produk hasil samping

industri kelapa sawit sebagai pakan ternak. Sehingga sedikit sekali peternak yang sudah memanfaatkan sumber daya pakan ini.

Salah satu tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial selain kelapa sawit di Provinsi Aceh adalah kopi. Pada tahun 2016, luas areal perkebunan kopi adalah 121,262 ha dengan produksi kopi sebesar 64,380 ton/tahun. Walaupun perkebunan kopi tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, namun kabupaten yang memiliki luasan yang paling tinggi adalah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

Limbah pengolahan kopi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan adalah kulit buah kopi. Proporsi bagian biji dan kulit buah akan tergantung dari cara pengolahan buah kopi menjadi kopi bubuk. Di Provinsi Aceh umumnya masih diolah secara tradisional, yaitu buah kopi yang telah matang dicuci dan dijemur di bawah panas matahari, setelah berat keringnya mencapai 40% selanjutnya dilakukan penggilingan untuk dipisahkan antara biji kopi (16-17%) dan kulit kopi bagian dalam dan luar sekitar 22-23% yang merupakan hasil ikutan yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk. Diperkirakan produksi limbah kulit kopi mencapai 2,897 ton/tahun. Namun demikian pemanfaatan limbah kopi sebagai pakan ternak di Provinsi Aceh belum dilakukan. Hal ini disebabkan peternak belum memiliki pengetahuan tentang potensi pakan dari limbah kopi tersebut.

Pasar menjadi faktor penting dalam pengembangan peternakan di suatu wilayah. Potensi pasar terhadap ternak dan hasil ternak menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan peternakan ke depan. Dilihat dari sisi potensi pasar, pengembangan peternakan di Provinsi Aceh sangat prospektif dari sisi permintaan, terutama untuk konsumsi disamping sebagai bahan baku industri berbasis hasil ternak, khususnya sapi. Sapi dikonsumsi masyarakat Aceh sehari-hari dalam bentuk daging segar, untuk penyajian restoran dan juga dikonsumsi dalam bentuk makanan olahan jadi berbasis daging sapi. Sementara kerbau dikonsumsi masyarakat Aceh, terutama untuk kegiatan resepsi dan upacara adat atau keagamaan. Permintaan pasar untuk ternak sapi hidup juga cukup besar dari luar wilayah Aceh, terutama dari Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan pasar untuk kedua komoditas ini cukup prospektif.

Menurut BPS Pada tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi per kapita seminggu menurut kelompok daging mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya pada daging ayam ras sebesar 6,42 persen. Sementara itu rata-rata konsumsi per kapita seminggu untuk daging sapi dan babi masih sama, namun konsumsi daging ayam kampung mengalami penurunan sebesar 6,67 persen. Pada Tabel 2.17 terlihat adanya

persamaan pola rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk telur dan daging ayam tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi telur ayam ras sebesar 2,76 persen, namun terjadi penurunan pada konsumsi telur ayam kampung sebesar 11,27 persen.

Dari beberapa kelompok makanan yang menyehatkan hanya daging, telur dan susu yang konsumsi kalori per kapita mengalami kenaikan pada awal masa pandemic ini, yaitu 2,84 kkal untuk daging dan 0,42 kkal untuk telur dan susu. Sementara kelompok makanan yang nyata-nyata juga menyehatkan seperti ikan, sayuran dan buah-buahan konsumsi kalori per kapitanya justru menurun yaitu 0,66 kkal untuk ikan, 0,50 kkal untuk sayuran dan 1,60 kkal untuk buah-buahan. Konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok daging pada tahun 2020 sebesar 65,03 kkal meningkat sebesar 4,57 persen dibandingkan konsumsi tahun 2019 sebesar 62,19 kkal. Konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok telur dan susu pada tahun 2020 sebesar 60,62 kkal, meningkat sebesar 0,70 persen dibandingkan konsumsi tahun 2019 sebesar 60,20 kkal. Proporsi konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok daging serta kelompok telur dan susu terhadap total kelompok bahan makanan tahun 2020 masing-masing sebesar 3,08 persen dan 2,87 persen. Proporsi kelompok daging lebih besar dibandingkan kelompok telur dan susu.

Konsumsi protein per kapita sehari untuk kelompok daging pada tahun 2020 sebesar 4,05 gram, meningkat sebesar 4,38 persen dibandingkan konsumsi pada tahun 2019 sebesar 3,88 gram. Konsumsi protein per kapita sehari untuk kelompok telur dan susu pada tahun 2020 sebesar 3,47 gram atau meningkat sebesar 1,46 persen dibandingkan konsumsi tahun 2019 sebesar 3,42 gram. Proporsi konsumsi protein per kapita sehari untuk kelompok daging serta kelompok telur dan susu terhadap total kelompok bahan makanan tahun 2020 masing-masing 6,53 persen dan 5,60 persen. Proporsi kelompok daging lebih besar dibandingkan kelompok telur dan susu.

Pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan lebih banyak dibanding untuk kelompok makanan. Pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar 603.236 rupiah (49,22 persen) dan untuk kelompok bukan makanan sebesar 622.449 rupiah (50,78 persen). Proporsi pengeluaran untuk kelompok daging terhadap pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar 4,38 persen (26.441 rupiah), sedangkan kelompok telur dan susu sebesar 5,78 persen (34.860 rupiah).

Tabel. 2.17 Konsumsi Produk Peternakan Per Kapita Per Minggu 2016-2020

No	Komodoti	Satuan (Unit)	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
I	Daging	Kg					
A	Daging Segar	Kg					
1	Sapi	Kg	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009
2	Kerbau	Kg	-	0	-	-	-
3	Kambing	Kg	-	0,001	0	0	0

4	Babi	Kg	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Ayam Ras	Kg	0,098	0,109	0,107	0,109	0,116
6	Ayam Kampung	Kg	0,012	0,015	0,014	0,015	0,014
7	Bebek	Kg	-	0,001	-	-	-
8	Unggas	Kg	-	0	-	-	-
9	Daging Lainnya	Kg	-	0,001	0,002	0,002	0,002
B Daging Diawetkan							
1	Dendeng	Kg	-	0	-	-	-
2	Abon	Ons/0,1 kg	-	0,005	-	-	-
3	Daging Dalam Kaleng	Kg	-	0	-	-	-
4	Daging Diawetkan	Kg	0,005	0,001	0,001	0,002	0,002
C Lainnya							
1	Tetelan, Sandung Lamur	Kg	0,002	0,001	0,001	0,002	0,001
2	Hati	Kg	-	0,007	-	-	-
3	Jeroan (Usus, Paru, Limpa, Babat, Ampela, dsb)	Kg	-	0,002	0,006	0,007	0,008
4	Tulang	Kg	-	0,002	-	-	-
5	Lainnya	Kg	-	0,001	-	-	-
D Daging dari Makanan Jadi							
1	Soto, Gule, Sop, Rawon, Cincang/Soto	Porsi	0,154	0,160	0,174	0,179	0,172
2	Sate, Tongseng	Porsi	-	0,086	0,096	0,098	0,095
3	Ayam/Daging matang (Ayam Goreng, Rendang, dsb)	Potong	0,189	0,190	0,216	0,244	0,253
4	Daging Olahan Matang (Sosis, Nugget, Daging Asap, dsb)	Potong	-	0,359	0,518	0,605	0,631
II Telur							
1	Telur Ayam ras	butir/unit	1,914	2,041	2,079	2,067	2,124
2	Telur Ayam Kampung	butir/unit	0,068	0,078	0,073	0,071	0,063
3	Telur Itik	butir/unit	0,038	0,040	0,039	0,035	0,032
4	Telur Puyuh	butir/unit	0,149	0,176	-	-	-
5	Telur Lainnya	butir/unit	-	0,002	0,125	0,150	0,147
6	Telur Asin	butir/unit	-	0,033	-	-	-
III Susu							
1	Susu Segar	Liter	-	0,006	-	-	-
2	Susu Cair Pabrik	250 ml	0,057	0,068	0,089	0,109	0,119
3	Susu Kental Manis	397 gram	0,079	0,089	0,088	0,072	0,070
4	Susu Bubuk	Kg	0,018	0,017	0,018	0,017	0,017
5	Susu Bubuk Bayi	400 gram	0,013	0,013	0,013	0,013	0,014
6	Keju	Ons/0,1 kg	-	0,005	-	-	-
7	Hasi Lain dari Susu	Ons/0,1 kg	-	0,005	0,026	0,026	0,024

Sumber: Kementerian Pertanian, 2021

Potensi pasar untuk ternak sapi dan kerbau tidak hanya dari permintaan dalam bentuk daging sapi dan daging kerbau untuk konsumsi pasar lokal, tetapi juga permintaan sapi aceh dan kerbau. Selama ini permintaan sapi aceh dan kerbau datang dari Sumatera Utara yang ditampung di Pasar Ternak di Kabupaten Bireun sebagai hub. Potensi pasar di luar Aceh untuk bibit Sapi Aceh juga cukup prospektif, seperti di Riau dan Kalimantan.

Industri olahan untuk daging sapi-kerbau dan hasil-hasilnya secara umum belum berkembang. Industri olahan berkembang cukup baik hanya di beberapa wilayah saja

khususnya wilayah perkotaan seperti Banda Aceh. Artinya hampir sebagian besar, daging sapi dan kerbau dikonsumsi langsung masyarakat dalam bentuk daging segar. Sementara untuk sapi, produk olahan yang umum dilakukan diolah sebagai bahan baku pembuatan Bakso. Selain itu, industri rumah tangga atau skala kecil yang mengolah kerupuk kulit, Abon Sapi, dan Dendeng Sapi masih terbatas. Berkembangnya industri olahan hasil ternak sapi ini akan memberikan nilai tambah tinggi bagi masyarakat dan perekonomian wilayah secara umum. Adanya dukungan fasilitas infrastruktur dan pasar yang cukup memadai serta permintaan yang tinggi terhadap produk dan hasil ternak sapi dan kerbau beserta olahannya khususnya di perkotaan, menjadikan wilayah-wilayah ini sangat prospektif untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan agroindustri berbasis ternak sapi dan kerbau.

Dalam hal capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG)*, Dinas Peternakan telah melaksanakan berbagai program dalam upaya penurunan persentase kemiskinan di Aceh, Dinas Peternakan Aceh juga telah melakukan kegiatan penguatan kawasan peternakan, pengembangan pakan ternak. Kedua kegiatan tersebut diperuntukkan bagi peternak miskin dengan total cakupan sebesar 25 Ha dengan total realisasi anggaran mencapai Rp. 7.811.985.000,- dari total target anggaran Rp. 15.325.998.184 yang ditargetkan untuk 40 kelompok ternak dan 65 Ha Kawasan. Kegiatan tersebut hanya dianggarkan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 kegiatan tersebut tidak dianggarkan. Rincian hasil evaluasi pencapaian SDGs dapat dijabarkan dalam tabel 2.18 hasil evaluasi monev SDG tahun 2019-2020.

Tabel 2.18 Evaluasi capaian SDG Disnak 2019-2020

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Realisasi Target Tahunan (4)			Alokasi Anggaran Tahun(n) (Rp. Juta) (5)				Realisasi Anggaran Tahun (n) (Rp. Juta) (6)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018-2022	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Program Pemerintah Daerah														
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
PROGRAM 1: Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan														
2.00.03.02.03.22.034 Pengembangan Pakan Ternak	Ha	-	-	55	-	-	25	13.278.595.542	-	-	11.446.976.562	-	-	7.811.985.000
2.00.03.02.05.22.033 Penguatan Kawasan Perbibitan Ternak	Sentra	-	-	6	-	-	-	45.138.110.000	-	-	2.188.960.899	-	-	-
2.00.03.02.05.22.022 Pelestarian plasma nutfah sumber daya genetik hewan	Kelompok	-	-	40	-	-	-	-	-	-	1.690.060.723	-	-	-
2.5.2*														
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita/ Pertumbuhan PDRB (%)														
PROGRAM 1: Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan														
2.00.03.02.05.22.018 Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peternakan	Luas lahan (m2)	10.000	10.000	10.000				37.271.332.275			29.121.225.417			285.070.000

Sumber: Bappeda Aceh, 2021

Pada sub sektor peternakan dilakukan pencapaian indikator produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu program yang dilakukan untuk mendukung indikator tersebut yakni Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Kegiatan tersebut telah terealisasi di tahun 2018 dengan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 285.070.000,-. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Sementara tingkat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel 2.19 hasil evaluasi monev SDG tahun 2021.

Tabel 2.19 Evaluasi capaian SDG Disnak 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)		Realisasi Target Tahunan (4)		Alokasi Anggaran Tahun(n) (Rp. Juta) (5)		Realisasi Anggaran Tahun (n) (Rp. Juta) (6)	
		2021	2022	2021	2022 (Proyeksi)	2021	2022	2021	2022 (Proyeksi)
Program Pemerintah Daerah									
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									
PROGRAM 1: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain								
3.27.02.1.07.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ha	497 10	420	8	1.951.000.000	700.000.000	1.364.584.797	1.255.418.013
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya								
2.00.03.02.05.22.033	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kelompok	887 199	525	180	119.896.387.417	46.965.209.030	66.640.287.190	63.974.675.702

Sumber: Bappeda Aceh, 2021

Sementara pada kinerja serapan anggaran pada Dinas Peternakan Aceh jika dibandingkan dengan target realisasi dapat disajikan pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
 Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Peternakan Aceh Tahun 2018-2022 (TC-24)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022 (Proyeksi)	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	128.242.547.656	116.632.360.031	45.807.427.356	-	-	107.268.254.542	72.663.612.796	36.821.334.745	-	-	0,84	0,62	0,80	-	-	58.136.467.009	43.350.640.417
Belanja Tidak Langsung	20.678.038.719	22.230.242.008	29.974.646.210	-	-	19.814.829.428	21.519.900.199	21.643.525.406	-	-	0,96	0,97	0,72	-	-	14.576.585.387	12.595.651.007
Belanja Operasi	-	-	-	205.448.780.121	110.083.949.030	-	-	-	127.839.092.891	102.271.274.313	-	-	-	0,62	0,93	63.106.545.830	46.022.073.441
Belanja Modal	-	-	-	2.280.976.010	5.291.650.970	-	-	-	1.559.820.200	1.247.856.160	-	-	-	0,68	0,24	1.514.525.396	561.535.272
Total	148.920.586.375	138.862.602.039	75.782.073.566	207.729.756.131	115.375.600.000	127.083.083.970	94.183.512.995	58.464.860.151	129.398.913.091	103.519.130.473	0,85	0,68	0,77	0,62	0,90	137.334.123.622	102.529.900.136

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ternak sapi dipelihara baik secara ekstensif, semi intensif dan intensif dengan menggunakan tenaga kerja keluarga. Sistem pemeliharaan sapi ekstensif dan semi intensif biasanya banyak dijumpai pada wilayah-wilayah yang memiliki kawasan padang penggembalaan, perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan yang cukup luas. Sistem pemeliharaan intensif mulai berkembang terutama pada kawasan persawahan, hortikultura dan daerah dekat perkotaan. Sapi Aceh dan sapi Bali merupakan jenis sapi yang banyak dipelihara dengan sistem ekstensif atau semi intensif. Pada sistem ekstensif, ternak digembalakan sepanjang hari di padang penggembalaan, sementara pada sistem semi intensif, ternak biasanya digembalakan pada areal perkebunan kelapa sawit atau tegalan dan mendapat pakan hijauan yang tumbuh diantara tanaman tahunan. Ternak sapi ada juga yang mendapat pakan tambahan berupa daun dan pelepah sawit yang telah di *chopper*, rumput yang disabit oleh petani dari tempat lain dan limbah industri pertanian seperti dedak padi pada saat dikandangkan.

Pengelolaan ternak sangat sederhana, yaitu pemberian identifikasi atau tanpa identifikasi, serta tanpa pencatatan ternak yang jelas. Performa sapi sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas pakan yang tersedia dilokasi penggembalaan. Skala kepemilikan sapi beragam umumnya berkisar antara 2-20 ekor. Sementara Pemeliharaan ternak sapi secara intensif banyak dijumpai pada peternak sapi atau kelompok peternak yang telah mendapat pembinaan petugas penyuluh lebih intensif pada diwilayah-wilayah pertanian (sawah dan hortikultura), eks-transmigrasi serta di wilayah yang dekat dengan perkotaan. Peternak harus mengandangkan sapi agar tidak mengganggu tanaman padi dan hortikultura. Sapi-sapi bantuan pemerintah seperti sapi *Brahman Cross (BX)* umumnya dipelihara secara intensif didalam kandang dekat rumah tinggal.

Sistem pemeliharaan intensif juga banyak dijumpai pada wilayah-wilayah yang mengembangkan usaha penggemukan sapi secara feedlot, dengan menggunakan sapi silangan hasil inseminasi buatan. Usaha penggemukan sapi secara intensif dengan menggunakan bakalan sapi silangan hasil IB mulai banyak diminati para peternak, seperti di Sabang, Banda Aceh, Bireuen, Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Sapi bakalan tersebut banyak yang didatangkan dari luar Provinsi Aceh. Tingkat kepemilikan ternak pada sistem pemeliharaan intensif umumnya masih relatif rendah, yaitu berkisar 2-10 ekor. Pada pemeliharaan intensif, biasanya target pemasaran telah dirancang khususnya untuk pasaran hari-hari besar keagamaan dan acara khusus, dimana permintaan pasar sangat tinggi, sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh oleh peternakan.

Secara umum, pemeliharaan ternak kerbau dilakukan secara ekstensif di pinggiran sungai dan hutan, di padang penggembalaan, serta di areal sawah. Budaya petani yang

memanen padi sawah rata-rata setahun sekali secara tradisi melepaskan kerbau di areal persawahan pasca panen. Sementara, pada musim tanam padi, ternak digembalakan atau dilepas di pinggiran sungai atau hutan. Ternak kerbau sangat mengandalkan pakan dari hijauan di areal penggembalaan. Pengelolaan ternak sangat sederhana, tanpa ada identifikasi dan pencatatan ternak yang memadai. Ternak kerbau dengan sistem pemeliharaan ekstensif pada umumnya mengalami kendala keterbatasan pejantan unggul. Pejantan yang ada dalam suatu koloni kerbau sering mengawini induk hingga beberapa generasi yang berakibat pada penurunan produktivitas dan daya hidup (*vigoritas*) kerbau karena terjadinya silang dalam (*inbreeding*). Populasi ternak kerbau di Provinsi Aceh dikawatirkan tidak berkembang cukup cepat dibandingkan dengan laju pemotongan yang relatif tinggi sehingga diperlukan adanya program-program pengembangan ternak kerbau untuk menjaga kelestarian ternak tersebut.

Ternak kambing dan domba merupakan ternak ruminansia kecil yang prolif dan mudah berkembang pada daerah tropis. Ternak ruminansia kecil ini tersebar diseluruh wilayah kabupaten di Provinsi Aceh, kecuali ternak domba tidak terdapat di Kabupaten Simeulue. Populasi kambing jauh lebih tinggi dibandingkan populasi domba, menunjukkan bahwa ternak kambing lebih diminati oleh petani karena lebih mudah beradaptasi terhadap sistem pemeliharaan dengan input rendah. Pemeliharaan ternak kambing dan domba umumnya semi intensif dan intensif, ternak dilepas disekitar pemukiman atau lahan pertanian serta dikandangan sepanjang waktu. Pakan utama ternak kambing adalah dedaunan (*browsing*).

Sistem produksi ternak ruminansia kecil belum berkembang dengan baik pada peternakan rakyat. Budidaya ternak sebagian besar masih menerapkan teknologi input rendah dengan menggunakan pakan hijauan sebagai sumber pakan utama. Sistem produksi yang berkembang utamanya adalah pengembangbiakan ternak, sementara usaha penggemukan ternak ruminansia kecil berbasis pakan penguat (konsentrat) belum berkembang dengan baik. Penyediaan pakan konsentrat berbasis sumberdaya lokal merupakan strategi penting dalam rangka pengembangan usaha penggemukan ternak ruminansia pedaging.

Pola pemeliharaan unggas lokal berupa ayam kampung dan itik pada umumnya dilakukan secara tradisional dengan input teknologi budidaya yang rendah, baik dengan skala usaha subsiten maupun dengan skala usaha yang lebih ekonomis. Ayam dilepas di pekarangan atau diumbar untuk mencari pakannya sendiri dan sore hari kembali ke kandang atau pohon disekitar rumah. Sementara banyak juga petani yang menerapkan metode pemeliharaan dengan sistem lepas tertutup (*backyard poultry farming*) dengan penggunaan sedikit tambahan input produksi seperti dedak atau pakan tambahan lainnya. Produksi sapi potong yang

berkembang di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi dua sistem produksi, yaitu: a) usaha pengembangbiakan (*breeding*) sapi dan usaha penggemukan (*fattening*) sapi.

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis dalam pemasaran produk peternakan karena kebutuhan masyarakat akan hasil ternak relatif tinggi dan letak geografis yang dekat dengan Sumatera Utara dan Riau, serta negara tetangga yaitu Malaysia sehingga membuka peluang pasar ekspor hasil ternak. Saat ini, sarana produksi peternakan seperti pakan konsentrat, obat-obatan maupun bibit ternak banyak didatangkan dari Sumatera Utara untuk menunjang proses produksi. Sementara, penanganan dan pengolahan pasca panen masih dilakukan secara sederhana. Arah pengembangan agribisnis peternakan di Aceh harus memperkuat industri hulu dan mengembangkan industri hilir. Menumbuh kembangkan industri peternakan hulu-hilir merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam proses produksi, mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, serta meningkatkan daya saing hasil ternak.

Pemasaran merupakan salah satu ujung tombak dalam pengembangan usaha peternakan, mencakup pemasaran ternak dan hasil ternak. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan di wilayah Provinsi Aceh, secara umum Provinsi Aceh merupakan importir ternak sapi bakalan. Selama ini kebutuhan sapi bakalan ternak dipasok dari luar wilayah khususnya dari Sumatera Utara yang dikirim melalui jalur darat lewat perbatasan wilayah Timur Aceh. Selama ini, pemasaran ternak kerbau, sapi potong dan bibit sapi aceh dilakukan peternak umumnya ke pedagang pengumpul lokal. Pedagang pengumpul lokal selanjutnya menjual ternak tersebut ke RPH atau Pasar Ternak setempat, atau bahkan langsung ke pasar ternak besar seperti di Bireuen. Pedagang besar pengumpul yang datang dari luar wilayah Aceh (khususnya dari Sumatera Utara) selanjutnya membawa ternak melalui jalur darat.

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa **tantangan** dalam pengembangan peternakan Provinsi Aceh adalah :

1. Kontinuitas dan kualitas HPT terutama kandungan protein dan energi masih rendah;
2. Keterbatasan akses mendapatkan sumberdaya pakan asal agroindustri perkebunan;
3. Industri dan teknologi pengolahan pakan belum berkembang;
4. Ketersediaan sapi bakalan silangan lokal melalui IB terbatas;
5. Sistem pelayanan peternakan masih kurang;
6. Fasilitas penunjang pengembangan peternakan belum optimal penggunaannya bahkan beberapa fasilitas masih terbatas jumlahnya;
7. Kapasitas peternak dan kelompok peternak masih rendah dan masih tergantung kepada bantuan atau program pemerintah;

8. Produktivitas ternak ruminansia masih rendah karena inbreeding, ketersediaan pakan serta keragaan reproduksi;
9. Dukungan industri hulu dan hilir peternakan masih terbatas;
10. Adanya penurunan kualitas sapi Aceh yang dapat mengancam populasi;
11. Adanya persaingan pemanfaatan bahan pakan asal agroindustri perkebunan dan pertanian;
12. Adanya ekspor bahan baku pakan keluar Provinsi Aceh karena perbedaan harga yang tinggi;
13. Impor daging sapi dari luar Provinsi Aceh;
14. Munculnya ancaman penyakit ternak.

Sementara terdapat beberapa faktor yang merupakan **peluang** pengembangan peternakan di Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Daya dukung Hijauan Pakan Ternak (HPT) tersedia dan melimpah;
2. Daya dukung bahan konsentrat asal limbah agroindustri perkebunan/ pertanian melimpah;
3. Daya dukung lahan untuk pengembangan HPT tersedia, karena adanya pertanian, perkebunan dan KPHP (Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi);
4. Infrastruktur produksi dan pemasaran tersedia;
5. Dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan peternakan tinggi;
6. Tersedia ternak lokal yang memiliki keunggulan beradaptasi pada kondisi iklim tropis. Jenis ternak lokal, terutama sapi dan kerbau lebih tahan terhadap cekaman panas dan pakan terbatas dibandingkan dengan ternak eksotik;
7. Tersedianya kawasan-kawasan peternakan yang tersebar hampir di setiap kabupaten yang dapat dijadikan sentra pengembangan ternak;
8. Minat masyarakat untuk beternak sapi dan kerbau tinggi;
9. Investasi usaha pembibitan dan penggemukan serta industri peternakan masih terbuka luas;
10. Dukungan kebijakan Nasional yang selaras dengan program pengembangan peternakan di Provinsi Aceh;
11. Permintaan produk dan hasil ternak ruminansia tinggi baik pasar lokal dan regional;
12. Peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Balai Pembibitan Ternak Unggul Indrapuri, perusahaan perkebunan sawit, karet dan KPHP untuk pengembangan sapi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1. Pada tahun 2020 sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 28,80 persen. Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 27,77 persen, sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua dengan nilai sebesar 14,62 persen, namun kontribusinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 15,39 persen.

Tabel 3.1 Laju dan Nilai Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016 -Triwulan III-2021 (Persen)

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020		2021					
	GROWTH	KONTRIBUSI	TW-I		TW-II		TW-III									
											GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	27,8	5,25	28,09	4,03	27,93	3,39	27,77	3,47	28,80	-4,86	28,58	2,63	28,62	-3,25	27,55
Pertambangan & Penggalian	-12,79	6,98	5,58	7,08	6,66	7,22	5,91	7,29	8,23	7,97	6,96	7,76	-27,66	6,51	-27,66	8,68
Industri Pengolahan	-5,84	5,24	-2,87	4,88	8,26	5,05	-01,10	4,8	-4,43	4,60	10,37	4,76	0,42	4,88	0,42	4,79
Pengadaan Listrik dan Gas	10,39	0,15	4,55	0,15	7,55	0,16	6,95	0,16	2,78	0,17	-1,23	0,17	-2,87	0,17	-2,87	0,16
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,32	0,03	4,53	0,03	7,17	0,03	24,2	0,04	-2,87	0,04	-0,90	0,04	-3,17	0,04	-3,17	0,04
Konstruksi	12,65	10,43	-4,2	9,59	2,74	9,42	5,16	9,51	10,61	10,56	-0,80	10,36	-2,58	9,70	-2,58	10,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,15	15,74	3,55	15,64	4,05	15,56	3,01	15,39	-5,34	14,62	-5,05	14,02	8,37	15,64	8,37	14,46
Transportasi dan Pergudangan	-0,49	7,64	4,99	7,69	2,67	7,55	2,96	7,47	-28,44	5,36	-8,64	6,60	63,29	5,82	63,29	6,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,39	1,19	11,29	1,27	8,28	1,32	6,73	1,35	-7,63	1,25	-12,63	1,12	-11,39	1,04	-11,39	1,02
Informasi dan Komunikasi	2,72	3,6	2,71	3,55	2,23	3,47	5,26	3,51	11,98	3,94	4,51	4,17	-1,59	4,03	-1,59	4,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,86	1,7	4,48	1,7	0,87	1,64	12,58	1,77	0,55	1,79	-7,68	1,77	-7,04	1,67	-7,04	1,70
Real Estate	7,79	3,87	7,88	4,01	6,09	4,07	6,87	4,17	-1,19	4,14	-2,37	4,28	1,50	4,14	1,50	4,44
Jasa Perusahaan	7,14	0,63	4,67	0,63	6,61	0,65	5,83	0,66	-3,19	0,64	-5,79	0,62	-3,95	0,59	-3,95	0,66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,75	8,55	8,62	8,91	6,28	9,06	3,18	8,97	-3,31	8,71	-1,65	8,17	12,42	9,97	12,42	8,67
Jasa Pendidikan	9,99	2,35	9,98	2,48	7,94	2,56	8,65	2,67	3,47	2,77	5,11	2,74	-7,24	2,54	-7,24	2,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,16	2,77	9,04	2,89	5,79	2,93	7,52	3,02	4,48	3,17	9,85	3,33	14,84	3,31	14,84	3,37
Jasa Lainnya	6,41	1,33	8,25	1,38	5,33	1,39	7,24	1,44	1,47	1,45	0,73	1,50	-1,01	1,34	-1,01	1,38
PDRB	3,29	100	4,18	100	4,61	100	4,14	100	-0,37	100	-1,89	100	2,56	100	2,56	100

Sumber: BPS Aceh dalam RPA, 2022

Selain itu, faktor inflasi menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dalam perekonomian. Penyebab inflasi antara lain; *cost push inflation, demand pull inflation dan expected inflation*. Unsur ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecenderungan kenaikan perubahan struktur harga. Begitu juga sebaliknya, deflasi yang terus menerus akan menimbulkan resesi dimana perekonomian mengalami kelesuan, tidak ada gairah bagi produsen untuk meningkatkan produksi.

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi : kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Pada sisi lain jumlah penduduk miskin di Aceh per Maret 2021 sebanyak 834,24 ribu orang (15,33 persen), bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang (15,43persen). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera, karena sangat relevan dengan tingkat kemiskinan di Aceh pada p September 2020–Maret 2021 antara lain tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 (6,30 persen) lebih rendah dibanding Agustus 2020 (6,59 persen).

Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak pada bertambahnya penduduk miskin di Aceh. komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh

terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Pada periode September 2020–Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,847 pada September 2020 menjadi 2,863 pada Maret 2021. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,831 pada September 2020 menjadi 0,749 pada Maret 2021.

Peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2021 terjadi hampir di semua kategori jenjang pendidikan di Aceh. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab keterpurukan tersebut, dengan jumlah laki-laki yang menganggur akibat Covid-19 sebanyak 9,9 ribu orang dan perempuan sebanyak 8 ribu orang. Bila dilihat dari sebarannya berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penganggur terbanyak akibat Covid-19 berada di wilayah perdesaan sebanyak 9,1 ribu orang dan perempuan sebanyak 8 ribu orang. Jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19. Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 878.000 jiwa. Tahun 2020 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian berdasarkan PDRB dengan migas sebesar Rp. 43 juta. Jumlah penduduk bekerja terbanyak kedua terdapat pada sector perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 372.000 orang dengan produktivitas sebesar 51,7 juta. Sektor jasa keuangan memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar 12.000 jiwa dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari semua sektor, pertambangan menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dengan produktivitas sebesar 655 juta. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makanan menjadi sektor dengan produktivitas terendah sebesar 14,4 juta.

Meskipun secara umum jumlah tenaga kerja sektor pertanian dominan dari semua sektor, namun bila dibandingkan dengan sektor lainnya produktivitas pertanian masih jauh lebih rendah karena serapan tenaga kerja dan nilai PDRB nya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usaha tani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDRB juga dapat meningkat yaitu sebesar 37.900.000.000.000. Produktivitas tenaga kerja tahun 2020 pada lapangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 43.166.287.

Subsektor peternakan dapat menjadi salah satu tumpuhan dalam percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh. Secara nasional, pengembangan peternakan sapi dewasa ini cenderung stagnan khususnya pada ternak sapi yang menghadapi beragam kendala seperti lemahnya sisi pembibitan, persaingan dengan produk impor, dan belum berkembangnya sistem usaha yang ekonomis. Oleh karena itu, potensi sumberdaya peternakan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh dapat menjadikan salah satu sentra pengembangan peternakan yang memiliki peran strategis secara nasional.

Peternakan rakyat masih memegang peranan sebagai aset terbesar dalam pembangunan peternakan nasional, tetapi sampai saat ini tipologinya masih bersifat sambilan (tradisional) yang dibatasi oleh usaha kecil, teknologi sederhana, dan produknya berkualitas rendah. Peternakan rakyat mempunyai ciri-ciri, yaitu skala usahanya relatif kecil, merupakan usaha rumah tangga, dilakukan sebagai usaha sampingan, menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitas rendah dan mutu produk tidak seragam, serta bersifat padat karya dan basis organisasi kekeluargaan. Sistem peternakan rakyat baik sapi, kerbau dan ternak lainnya dipelihara dengan cara-cara yang sederhana masih tradisional. Sepanjang hari digembalakan di ladang sendiri atau di tanah gembalaan umum, di tepi jalan, dan di pinggir sungai dimana banyak tumbuhan rumput. Kadang-kadang dimandikan di sungai dan sore hari dibawa pulang dan dikandangkan di kandang yang sederhana. Pekerjaan di dalam usaha ternak ini dilakukan oleh anggota keluarga.

Indikator kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur dengan Nilai Tukar Peternak (NTPt) Pada Desember 2021, Nilai tukar petani untuk subsektor peternakan (NTPt) sebesar -96,99 atau mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) meningkat sebesar 0,44 persen dengan naiknya harga jual komoditas ternak kecil (kambing) serta unggas (ayam ras pedaging, dan ayam buras/kampung). Demikian juga halnya dengan Indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,27 persen dengan meningkatnya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT) dan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,19 persen dan 0,48 persen.

Untuk mengetahui analisa capaian kinerja tahun 2021 dengan sasaran strategis Meningkatkan kesejahteraan petani peternak dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut :

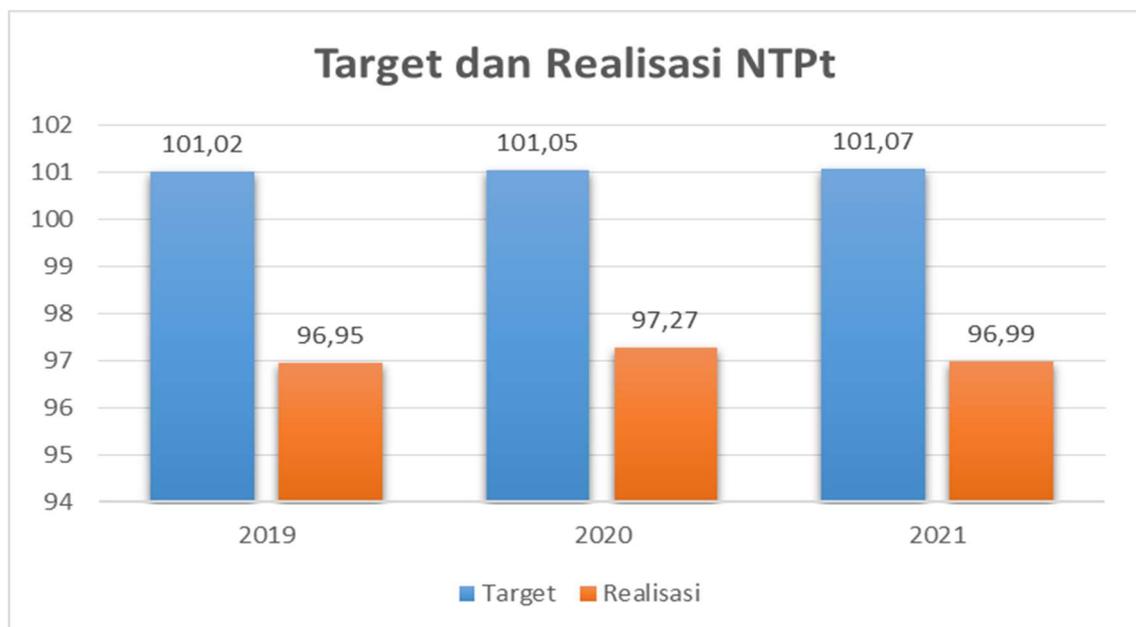
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternak

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2021		
			Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Indeks terima ternak (It)	102,05	147,54	104,67	70,9435

2	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	96,71	101,07	96,99	95,9632
---	-----------------------------	-------	--------	-------	---------

Sumber: BPS Aceh dalam RPA, 2022

Indeks terima ternak atau indeks harga yang diterima peternak adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi peternak. Dari indeks harga yang diterima peternak (It) ini dapat dilihat fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan peternak. Sementara Indeks NTPt merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani peternak. Indeks NTPt merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Untuk mengetahui perkembangan NTPt dapat dilihat dalam gambar berikut :



Sumber: RPA, 2022

Gambar 3.1 Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) Subsektor Peternakan Tahun 2019-2021

Grafik tersebut menunjukkan bahwa NTPt subsektor peternakan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,33, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 0,28 yang berarti bahwa daya beli peternak mengalami fluktuasi naik turun. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di beberapa daerah di Provinsi Aceh pada Desember 2021, dihasilkan NTP sebesar 104,33 atau mengalami peningkatan sebesar 0,42 persen. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 0,62 persen dan indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,20 persen. Disamping gambaran perkembangan NTPt, dapat juga kita lihat pada perkembangan angka Indeks ternak (It) subsektor peternakan dalam grafik berikut :



Sumber: RPA, 2022

Gambar 3.2 Indeks harga yang diterima petani (It) subsektor peternakan tahun 2018-2021

Indeks harga yang diterima petani (It) sekalipun belum memenuhi target yang direncanakan, namun sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan dan hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan petani peternak sekalipun dalam masa Pandemi *covid-19* yang melanda negeri pada tahun 2020 hingga sekarang.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern untuk mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Adapun Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja :

1. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri

SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :

2. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
3. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan

SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :

4. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
5. persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan

SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja :

6. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian

SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :

8. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
9. ndeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan

SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :

10. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
11. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
12. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)

SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :

13. persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani

14. persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :

15. nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :

16. nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh. dua kawasan diantaranya adalah kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri. sementara satu lagi merupakan kawasan khusus yang memiliki potensi dan keunggulan antara lain di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Secara umum, Pola ruang Aceh terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola

ruang berdasarkan RTRW Aceh yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya untuk sub sektor peternakan seluas 12.930,99 Ha.

3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Disamping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP). Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS didefinisikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMA memberikan pilihan skenario pembangunan di Aceh perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih fokus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi, utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis dalam Renstra Dinas Peternakan mengacu pada isu strategis RPA 2023-2026 yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digenjut dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru berbasis kawasan (kluster) dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, Aceh harus berfokus pada pengembangan komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diminati pasar regional dan internasional.

Pengembangan usaha ternak sapi potong di Provinsi Aceh masih menjadi primadona, akan tetapi permintaan daging yang semakin tinggi ternyata tidak disertai dengan produksi yang memadai. Hal ini disebabkan karena pola pemeliharaan sapi potong yang dikembangkan

masyarakat mayoritas masih menggunakan sapi pola ekstensif (tradisional), yaitu dilepas pada lahan kosong, tegalan atau padang penggembalaan dan pengembangbiakannya dilakukan secara kawin alam yang mengakibatkan tingginya peluang terjadi perkawinan sedarah (*in breeding*). Ancaman lainnya adalah terjadinya seleksi negatif terhadap ternak masyarakat, dimana ternak pejantan yang memiliki performan baik dan unggul dalam populasi, diambil atau dijual untuk digemukkan dan dipotong. Sementara dengan pola pemeliharaan ekstensif tersebut mengakibatkan sistem breeding, rekording dan seleksi ternak tidak berjalan pada peternakan masyarakat, sehingga kualitas bibit sapi yang dipelihara masyarakat diperkirakan terus menurun.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya adalah terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnya pakan ternak; sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu. Dari berbagai permasalahan peternakan yang muncul tersebut, maka dapat diurutkan beberapa isu utama peternakan, yaitu:

- 1) Populasi ternak ruminansia sebagai pendukung produksi daging cenderung mengalami penurunan;
- 2) Terbatasnya akses terhadap lahan perkebunan untuk penggembalaan bagi peternak dan lahan peternakan rakyat mulai beralih fungsi menjadi non pertanian;
- 3) Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, Gangguan Reproduksi, Surra dan Parasiter dan ketersediaan obat-obatan serta peralatan medis di puskesmas belum mencukupi;
- 4) Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif dan pemotongan ternak di luar RPH serta belum adanya RPH yang memiliki NKV;
- 5) Belum tersedianya wilayah sumber bibit ternak dan belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB);
- 6) Sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dengan kualitas yang baik dan mahalnya pakan ternak;
- 7) Sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak

berorientasi bisnis;

- 8) Belum adanya industri pakan ternak yang dapat memanfaatkan bahan baku lokal;
- 9) Manajemen budidaya dan produksi ternak masih dilakukan secara tradisional dan sarana prasarana peternakan belum memadai;
- 10) Keterbatasan SDM dan petugas lapangan baik secara kuantitas maupun kualitas;
- 11) Kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.
- 12) Belum terpadunya pengembangan wilayah dengan penetapan komoditas unggulan disetiap Kabupaten/Kota;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

RPA Pada Tahun 2023 telah memasuki Tahapan pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan ini adalah tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera. Berdasarkan RPJP Aceh 2012-2032 Prioritas pembangunan pada periode tersebut diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Salah satu tujuan dalam RPA adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19. Pada dasarnya membangun peternakan bukan hanya membangun budidaya komoditi, tetapi membangun petani dalam suatu sistem yang utuh dari sistem agribisnis yang berbasis komoditi peternakan pada kawasan sentra-sentra pengembangan agropolitan. Pengembangan agribisnis komoditi peternakan unggulan, dalam rangka menunjang program pengembangan ekonomi daerah, diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak saja bagi peningkatan produksi peternakan di Provinsi Aceh, juga mampu membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang peternakan, sehingga mampu meningkatkan aktifitas perekonomian. Dengan program pemberdayaan kelompok usaha, kelembagaan usaha peternakan, akan dapat meningkatkan produktifitas usaha tani ternak, dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya melalui penerapan azas skala usaha yang layak dan menjamin kelangsungan usaha. Oleh karenanya, tujuan utama Dinas Peternakan Aceh haruslah sejalan dengan tujuan RPA yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19.

4.2 Sasaran

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan

isu-isu strategis pembangunan daerah RPJPA menetapkan Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (*added values*) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM, Swasta Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan *cluster* agro industri dan industri manufaktur. Sementara sasaran dari tujuan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19 dalam sub sektor peternakan ada dua yaitu meningkatnya potensi sektor peternakan dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian Aceh. Pembangunan subsektor peternakan secara kontinyu dan terarah telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, yaitu secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi implementasi pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang menggerakkan pembangunan peternakan dalam peningkatan produksi dan produktivitas peternakan. Kontribusi subsektor peternakan adalah untuk penyediaan produk hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan peternak dan penyediaan lapangan kerja. Sehingga indikator tujuan pembangunan subsektor peternakan adalah persentase kontribusi

subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Sasaran yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan peternak dan meningkatnya potensi sektor peternakan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Nilai Tukar Peternak (NTPt) yang terdiri atas 4 (empat) kelompok besar yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak. Secara konseptual, NTPt adalah pengukur kemampuan tukar menukar barang peternakan yang dihasilkan peternak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam menghasilkan produk peternakan. Nilai Tukar Peternak (NTPt) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima peternak terhadap indeks harga yang dibayar peternak, yang dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan/daya beli peternak. NTPt juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk peternakan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi peternakan. Semakin tinggi NTPt, semakin kuat pula tingkat daya beli peternak.

Dari paparan tersebut dapat ditarik bahwa tujuan pelayanan Dinas Peternakan Aceh

Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19 dengan Sasaran 1) Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan dengan Meningkatnya Persentase kontribusi sub sektor peternakan; dan 2) Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan dengan Meningkatnya kesejahteraan Peternak. Adapun Indikator dan target capaian 2023-2026 secara detail disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan Aceh (TC-25)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	S A T	KONDISI AWAL (2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19		Persentase Penduduk	%	15,53	15,03	14,53	14,03	13,53	13,53
5.1		Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	101,19 *)	101,34	101,49	101,65	101,80	101,80
1		Meningkatnya kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	%	96,99	99,03	101,07	103,11	105,15	105,15
5.6		Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	%	30,98*)	31,13	31,23	31,32	31,48	31,48
2		Meningkatnya potensi sektor peternakan	Persentase kontribusi sub sektor peternakan	%	2,82	3,50	3,70	3,80	4,00	4,00

Sumber: RPA, 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan adalah strategi dan kebijakan Dinas Peternakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

5.1 Strategi

Kelangsungan pembangunan peternakan sapi potong di Provinsi Aceh sangat ditentukan oleh sejauh mana pemanfaatan sumberdaya pakan yang melimpah secara berkesinambungan. Lambatnya laju pertumbuhan populasi khususnya sapi potong harus diantisipasi melalui pembenahan dalam sistem perbibitan. Komitmen pemerintah daerah yang didukung oleh motivasi peternak merupakan modal yang sangat berharga dalam pengembangan peternakan berkelanjutan. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mengembangkan perbibitan perlu diupayakan, demikian juga halnya kerjasama dengan akademisi (perguruan tinggi) terutama dalam pengembangan teknologi pemuliaan dan produksi sangat diperlukan, di samping penetapan wilayah sentra pengembangan peternakan sapi potong.

Pakan yang diberikan untuk ternak terutama sapi potong dan kambing umumnya hanya hijauan, sedangkan pakan konsentrat terbatas. Oleh karena itu produktivitas dan reproduksi ternak masih rendah. Secara umum kualitas pakan tersebut masih rendah dengan kandungan nutrisi yang terbatas. Oleh sebab itu strategi peningkatan kualitas pakan diarahkan kepada teknologi pengolahan pakan dengan bahan baku lokal yang cukup tersedia. Di samping itu dalam rangka peningkatan produksi ternak, perlu dilakukan perbaikan tatalaksana produksi, peningkatan kemampuan SDM peternak dan petugas peternakan serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang peternakan.

Efisiensi dan produktivitas usaha peternakan dapat dicapai melalui alokasi sumberdaya secara optimal sesuai dengan potensi setempat. Setiap daerah memiliki karakter sumberdaya dan lingkungan masing-masing sehingga daya dukung terhadap masing-masing aktivitas agribisnis ternak akan berbeda. Oleh karena itu perlu ditetapkan prioritas kegiatan agribisnis di masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesesuaian agroklimat, prospek pasar, dukungan budaya dan sosial setempat, nilai tambah dan keberlanjutan. Hal tersebut antara lain melalui pengembangan sentra peternakan pembibitan, penggemukan dan industri.

Penguatan kelembagaan yang diperlukan mencakup pengembangan kelompok peternak, pengembangan layanan peternakan, dan kerjasama antar stakeholders secara lebih produktif. Pengembangan SDM peternakan perlu dilakukan guna menghasilkan produk peternakan berdaya saing tinggi di dalam maupun luar negeri, sehingga pengembangan SDM diarahkan pada peningkatan keterampilan serta profesionalisme petugas peternakan serta pelatihan bagi peternak. Pelatihan yang ditujukan baik bagi aparat petugas peternakan maupun bagi peternak tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan mereka. Pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak terkait seperti pihak perkebunan dan PKS, dunia usaha (swasta), dan perguruan tinggi dalam peningkatan *capacity building* melalui peningkatan profesionalisme peternak dan kelembagaan peternak serta peningkatan akses terhadap sumberdaya peternakan (modal, pasar, teknologi dan informasi).

Berangkat dari kondisi tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam RPA untuk meningkatnya potensi subsektor peternakan adalah **Strategi Peningkatan produksi sektor peternakan**. Sementara untuk meningkatnya kesejahteraan peternak dilakukan dengan **Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian**. Strategi tersebut kemudian dijabarkan dan dikembangkan kembali menjadi strategi operasional Dinas Peternakan. Strategi Peningkatan produksi sektor peternakan yaitu:

1. Penguatan wilayah-wilayah basis produksi melalui introduksi teknologi dan sistem manajemen peternakan yang efisien melalui pendekatan kawasan, baik kawasan pembibitan, budidaya, maupun kawasan pengolahan (industri hilir) peternakan;
2. Pengelolaan, peningkatan akses dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pakan lokal, baik HPT maupun bahan pakan konsentrat;
3. Peningkatan penyediaan fasilitas layanan peternakan, baik kuantitatif maupun kualitatif secara lebih merata untuk melayani aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi hasil peternakan;

Sedangkan Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM peternak dan petugas peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahaternak sehingga mampu memberikan nilai tambah dan menjaga keberlangsungan usaha. Strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan keterlibatan kelompok peternak perempuan dan petugas peternakan perempuan dalam setiap pelatihan dan even *upgrading* lainnya;
2. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan peternak dan koordinasi antara instansi terkait guna meningkatkan produksi dan keberlanjutan usaha ternak;

3. Promosi investasi melalui pemberian kemudahan perijinan dan penyediaan infrastruktur dasar;
4. Mendorong pengembangan industri hilir untuk pengolahan ternak dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan nilai tambah

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh pada Tahun 2023 adalah Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19. Selanjutnya tahun 2024 adalah Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak. Sementara tahun 2025 adalah Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian. Dan Arah kebijakan tahun 2026 adalah mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPA tersebut, maka Arah Kebijakan Operasional dalam pembangunan subsektor peternakan di Provinsi Aceh dijabarkan sebagai berikut:

2023 : Meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan peternak dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19.

1. Penguatan sistem produksi untuk membangun usaha yang berkarakter *precision farming* untuk meningkatkan daya saing usaha;
2. Peningkatan ketersediaan pakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pakan lokal;

2024 : Meningkatkan kualitas SDM petugas dan peternak untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan

1. Peningkatan kualitas SDM peternak dan petugas peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha ternak sehingga mampu memberikan nilai tambah dan menjaga keberlangsungan usaha dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;
2. Penerapan sistem manajemen kesehatan hewan terpadu dalam upaya

- mencegah penyebaran penyakit strategis di sentra produksi;
3. Peningkatan fasilitas layanan teknis dan bisnis peternakan pada kelompok/unit usaha peternakan di pusat produksi ternak dan hasil ternak;
- 2025 : Pembangunan infrastruktur strategis sentra dan kawasan peternakan dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
1. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sumber daya lahan dan sumber daya pendukung untuk menunjang percepatan investasi pengembangan ternak sapi dan kerbau;
 2. Percepatan transformasi hilirisasi kegiatan usaha peternakan di zona pengembangan kawasan strategis dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
 3. Peningkatan mutu genetik ternak sapi dan kerbau yang berdaya ekonomi tinggi di wilayah sentra pembiakan dan pembibitan;
- 2026 : Peningkatan pendapatan asli Aceh dari subsektor peternakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal
1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan peternak dan koordinasi antara instansi terkait guna meningkatkan produksi dan keberlanjutan usaha ternak;
 2. Penerapan sistem informasi dan komunikasi dalam upaya pembangunan peternakan Provinsi Aceh;

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya akan dituangkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan secara ringkas disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (TC-26)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	1 Meningkatkan potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	S.1 Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan peternak dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19	Meningkatkan kualitas SDM petugas dan peternak untuk mengoptimalkan nilai tambah produk peternakan	Pembangunan infrastruktur strategis sentra dan kawasan peternakan dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Peningkatan pendapatan asli Aceh dari subsektor peternakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal
	2 Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	S.2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian				

Sumber: RPA, diolah 2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPA guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program pembangunan peternakan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

I. URUSAN PENUNJANG

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan
 - d. Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - g. "Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 - A. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN"
 - 1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
 - 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - a. Penilaian Kultivar SDG Hewan
 - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - 3. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- a. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - c. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - a. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - b. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
 - c. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 5. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
 - a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - b. Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
 6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
 - a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
 - b. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
- B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
1. Penataan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
 - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
 - d. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
 2. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
 - b. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
- C. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - b. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - a. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - b. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - c. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
 3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
 - a. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
 - b. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - c. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 4. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
 - b. Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis
 5. Kesejahteraan Hewan
 - a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
 - b. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
- D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - a. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
 1. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 2. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
- F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
 - b. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
 - c. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

6.2 Pendanaan

Adapun kerangka pendanaan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2023-2026 disajikan dalam tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (TC-27)

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PETERNAKAN ACEH						69.443.236.015		83.350.271.752		85.095.247.622		86.902.766.306
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi pemerintah	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	62,38	95	44.127.484.812	95	53.794.621.752	95	55.612.487.622	95	56.267.793.006
X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	5	6	1.571.342.500	8	2.703.000.000	8	2.757.060.000	8	2.812.201.200
X XX 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	557.351.500	1	1.020.000.000	1	1.040.400.000	1	1.061.208.000
X XX 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1	163.764.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200
X XX 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200
X XX 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	213.902.000	1	204.000.000	1	208.080.000	1	212.241.600
X XX 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	204.000.000	1	208.080.000	1	212.241.600
X XX 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	124.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200
X XX 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	2	512.325.000	2	816.000.000	2	832.320.000	2	848.966.400
X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Orang	150,00	149	22.787.631.053	151	25.425.151.752	153	25.779.552.102	155	26.137.574.951
X XX 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	149	22.726.451.053	151	25.264.151.752	153	25.594.402.102	155	25.924.652.451
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	1	46.000.000	1	52.900.000	1	60.835.000
X XX 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	1	28.750.000	1	33.062.500	1	38.021.875
X XX 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	11.180.000	1	28.750.000	1	33.062.500	1	38.021.875
X XX 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	50.000.000	1	57.500.000	1	66.125.000	1	76.043.750
X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan dan dokumen Barang Milik Negara yang diinventarisir	Laporan	-	4	102.984.000	1	46.000.000	2	77.900.000	2	135.835.000
X XX 01 1.03 01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000
X XX 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1	102.984.000	-	-	1	25.000.000	-	-
X XX 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000
X XX 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	1	46.000.000	1	52.900.000	1	60.835.000
X XX 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah laporan dan dokumen retribusi daerah yang tersedia	Dokumen	-	-	-	2	75.000.000	1	25.000.000	2	65.000.000
X XX 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	1	50.000.000	-	-	-	-
X XX 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000
X XX 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000

X	XX	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensi dan disiplin	Orang	-	259	100.000.000	25	525.000.000	30	602.500.000	35	757.750.000		
X	XX	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	-	-	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	-	
X	XX	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	-
X	XX	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	-
X	XX	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	-
X	XX	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	-	10	100.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000	-	-
X	XX	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	-	-
X	XX	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	-	-
X	XX	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	Paket	5	5	1.247.264.850	9	2.124.525.000	9	2.291.800.520	9	2.473.491.562	-	-
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	40.000.000	1	99.150.000	1	107.075.520	1	115.641.562	-	-
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	325.000.000	1	349.920.000	1	377.925.000	-	-
X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	210.600.000	1	227.450.000	1	245.650.000	-	-
X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	329.162.000	1	575.325.000	1	621.350.000	1	671.050.000	-	-
X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	98.102.850	1	98.650.000	1	106.550.000	1	115.075.000	-	-
X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	23.975.000	1	25.900.000	1	27.950.000	-	-
X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	-	-
X	XX	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	1	48.600.000	1	52.480.000	1	56.650.000	-	-
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	750.000.000	1	723.225.000	1	781.075.000	1	843.550.000	-	-
X	XX	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	4	2	645.000.000	4	850.000.000	5	750.000.000	6	1.100.000.000	-	-
X	XX	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000	-
X	XX	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	-	-
X	XX	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	250.000.000	-	-	-	-
X	XX	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	150.000.000	1	250.000.000	-	-
X	XX	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	2	645.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	-	-
X	XX	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-
X	XX	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penunjang yang dibayarkan	Jenis Jasa	4	3	4.329.213.462	4	7.205.695.000	4	7.579.075.000	4	8.099.795.294	-	-
X	XX	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	-	-	1	72.450.000	1	88.350.000	1	106.342.219	-	-
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1.013.929.750	1	1.166.750.000	1	1.283.425.000	1	1.328.273.075	-	-
X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	200.298.053	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	-	-
X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	3.114.985.659	1	5.816.495.000	1	6.057.300.000	1	6.515.180.000	-	-

X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	84	92	1.344.048.947	100	2.340.250.000	108	2.549.600.000	112	2.686.145.000
X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.850.000	1	56.500.000	1	63.850.000	1	72.150.000
X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	82	87	901.850.000	90	1.497.250.000	98	1.691.900.000	102	1.811.850.000
X	XX	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000
X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	2	56.500.000	2	63.850.000	2	72.145.000
X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4	402.348.947	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000
X	XX	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
X	XX	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya penyelenggaraan layanan BLUD BTNR	Indeks reformasi birokrasi	Laporan	1	1	12.000.000.000	1	12.500.000.000	1	13.200.000.000	1	12.000.000.000
X	XX	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	12.000.000.000	1	12.500.000.000	1	13.200.000.000	1	12.000.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						25.315.751.203		29.555.650.000		29.482.760.000		30.634.973.300
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						25.315.751.203		29.555.650.000		29.482.760.000		30.634.973.300
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas komoditi peternakan	Pertumbuhan produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	%	13,46	14,80	9.620.406.486	16,29	15.381.500.000	17,91	12.872.300.000	19,71	15.145.260.000
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pengolahan pakan ternak	Jumlah alsintan/mesin pengolahan pakan yang didistribusikan kepada kelompok peternak	Unit	4	20	-	21	530.000.000	23	575.000.000	24	600.000.000
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	-	-	1	530.000.000	1	575.000.000	1	600.000.000
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Uji performance SDGH	Jumlah Komoditi yang tersedia	Komoditi	1	1	435.159.000	2	330.000.000	2	350.000.000	2	380.000.000
3	27	02	1.03	01	Penilaian Kultivar SDG Hewan	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Hewan	Jumlah Kultivar SDG Hewan yang Dinilai	Varietas	1	-	-	2	230.000.000	2	250.000.000	2	280.000.000
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	1	435.159.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Bibit dan Pengawas Mutu Pakan yang dilatih	Orang	10	1	1.635.423.000	69	940.000.000	69	690.000.000	69	690.000.000
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	1	1.635.423.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	-	-	-	1	250.000.000	-	-	-	-
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	10	-	-	46	460.000.000	46	460.000.000	46	460.000.000
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Produksi Benih/Bibit Ternak	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	Ekor	15.000	19.000	1.823.114.488	19.500	2.984.000.000	20.000	3.294.800.000	21.000	3.587.760.000
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	1	1.191.344.988	1	1.950.000.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	50	120	631.769.500	140	804.000.000	160	964.800.000	180	1.157.760.000
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	1	-	-	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Obat Hewan yang Beredar yang diperiksa mutu dan Keamanannya	Merek/ Jenis	-	1	141.472.498	2	110.000.000	3	175.000.000	5	250.000.000
3	27	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	-	1	141.472.498	1	110.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000
3	27	02	1.06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	-	-	-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak/Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ekor	12.020	800	5.585.237.500	1.310	10.487.500.000	1.020	7.787.500.000	1.250	9.637.500.000
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	11.720	600	4.806.685.500	1.010	8.837.500.000	670	5.862.500.000	850	7.437.500.000
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	30	20	778.552.000	30	1.650.000.000	35	1.925.000.000	40	2.200.000.000

3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas hasil peternakan	Pertumbuhan produksi telur (Ayam, Itik, Puyuh)	%	22,45	23,58	3.991.307.917	24,75	3.400.000.000	25,99	4.655.250.000	27,29	2.665.762.500
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya fungsi pelayanan unit kesehatan hewan dan peternakan	Jumlah Unit Rumah Sakit Hewan, Puskesmas, Laboratorium Pakan dan UPTD Layanan kesehatan Hewan yang terbangun/terpelihara	Unit	6	3	3.941.156.917	11	3.130.000.000	7	4.360.250.000	11	2.365.762.500
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Terbangun dan Terpeliharanya Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	-	-	-	1	650.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Terbangun dan Terpeliharanya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	4	-	-	4	400.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	1	-	-	1	500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	1	-	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	-	-	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	2	3	3.941.156.917	4	475.000.000	1	2.650.000.000	6	650.000.000
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tesedianya wilayah sumber bibit ternak	Jumlah wilayah sumber bibit yang ditetapkan	Lokasi	1	1	50.151.000	2	270.000.000	2	295.000.000	2	300.000.000
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	50.151.000	1	170.000.000	1	195.000.000	1	200.000.000
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya tingkat Morbiditas terhadap Agen Penyakit dari Parasit, Bakteri dan Virus	Penurunan Morbiditas terhadap agen penyakit dari Parasit, Bakteri dan Virus (angka kesakitan ternak)	%	22,75	17,96	9.866.861.398	17,42	6.014.150.000	16,90	6.939.210.000	16,39	7.499.670.800
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya jumlah kasus PHMS yang dilaporkan	Jumlah penegakan diagnosis dan penanganan terhadap kasus penyakit hewan	Ekor	8.428	13.828	7.317.011.099	15.211	2.942.150.000	16.732	3.298.450.000	18.214	3.628.250.000
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Bertanggungjawabnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	1	7.317.011.099	1	2.692.150.000	1	2.960.950.000	1	3.256.350.000
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	-	-	-	1	125.000.000	1	168.750.000	1	185.950.000
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggungjawabnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	-	-	-	1	125.000.000	1	168.750.000	1	185.950.000

3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terpantaunya pemasukan dan pengeluaran Hewan ternak dan produk hewan ternak lintas daerah Provinsi	Jumlah ternak yang diperiksa kesehatannya di Pos cek poin perbatasan provinsi	Ekor	571	-	-	39	197.000.000	44	220.760.000	50	246.420.800
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	-	-	1	116.000.000	1	133.280.000	1	151.942.400
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	-	-	1	27.000.000	1	29.160.000	1	31.492.800
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Terawasi dan Terperiksanya Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	-	-	-	1	54.000.000	1	58.320.000	1	62.985.600
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terpenuhinya persyaratan teknis sertifikasi pada zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan	Jumlah sampel yang diuji	Sampel	7.000	8.000	2.549.850.299	10.000	2.125.000.000	12.000	2.645.000.000	14.000	2.825.000.000
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	1	1	504.244.299	1	125.000.000	1	145.000.000	1	175.000.000
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	2.045.606.000	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	2.600.000.000
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terpenuhinya Persyaratan Teknis Kesmavet	Jumlah sertifikat keamanan produk hewan yang dimohonkan	Sertifikat	4	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Terkelolanya Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	4	-	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
3	27	04	1.04	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	5	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	Terselenggaranya penanganan kesejahteraan hewan	Jumlah NKV yang diterbitkan	NKV	1	-	-	2	650.000.000	2	675.000.000	2	700.000.000
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	1	-	-	2	550.000.000	2	575.000.000	2	600.000.000
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	1	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya jaminan keselamatan ternak dan keberlanjutan usaha peternakan dari bencana	Peningkatan jaminan keselamatan ternak dari bencana	%	0,16	0,21	-	0,25	60.000.000	0,30	75.000.000	0,36	100.000.000
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanggulangnya bencana pertanian dan Terkendalinya keberlanjutan usaha peternakan	Jumlah ternak yang memiliki asuransi syariah	Ekor	1.000	-	-	1.440	60.000.000	1.728	75.000.000	2.073	100.000.000
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	1	-	-	1	60.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000

3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya penertiban izin usaha bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase peningkatan izin usaha bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	0,10	0,16	-	0,21	200.000.000	0,27	225.000.000	0,35	275.000.000	
3	27	06	1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Terfasilitasinya perizinan Laboratorium Keswan/Kesmavet	Jumlah izin Laboratorium Keswan/Kesmavet yang direkomendasikan	Unit	-	-	-	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	
3	27	06	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	Laporan	-	-	-	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terlaksananya penertiban perizinan usaha pengecer obat hewan	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diterbitkan	Unit	2	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000
3	27	06	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	1	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3	27	06	1.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasannya Pelaksanaan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya nilai tambah produk Peternakan	Peningkatan Indeks Terima Peternak (ItPt)	Indeks	104,67	105,11	1.837.175.402	105,55	4.500.000.000	105,99	4.716.000.000	106,43	4.949.280.000	
3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM peternak	Jumlah peternak/peserta pelatihan yang ditingkatkan Kapasitas	Orang	200	460	1.238.925.402	500	2.700.000.000	540	2.916.000.000	600	3.149.280.000	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	5	23	1.238.925.402	23	2.700.000.000	23	2.916.000.000	23	3.149.280.000
3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Terbentuknya kelembagaan korporasi peternak dan terselenggaranya sekolah lapang peternak	Jumlah Koperasi Peternak yang dibentuk dan Sekolah Lapang Peternak yang Terbina	Kelompok	4	2	598.250.000	3	1.800.000.000	3	1.800.000.000	3	1.800.000.000	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Terbentuk dan Beroperasinya Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Laporan	1	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	2	2	598.250.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Rencana Strategis Dinas Peternakan Aceh merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran SKPA dalam melaksanakan program-program pembangunan peternakan di Aceh pada kurun waktu 2023-2026. Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA disajikan pada Tabel. 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPA (TC-28)

No.	Indikator Sasaran/ <i>Outcome</i>	Satuan	Definisi	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatnya potensi sektor peternakan	Persen	Indeks Harga yang Diterima Petani Subsektor peternakan dibagi Indeks Harga yang Dibayar Petani Subsektor peternakan	2,82	3,5	3,70	3,80	4,00	4,00
1	Pertumbuhan produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	Persen	Produksi daging th n dikurangi produksi daging th n-1 dibagi produksi daging th n-1 x 100	13,46	14,80	16,29	17,91	19,71	19,71
2	Pertumbuhan produksi telur (Ayam, Itik, Puyuh)	Persen	Produksi telur th n dikurangi produksi telur th n-1 dibagi produksi telur th n-1 x 100	22,45	23,58	24,75	25,99	27,29	27,29
II	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Indeks NTP	Indeks Harga yang Diterima Petani Subsektor peternakan dibagi Indeks Harga yang Dibayar Petani Subsektor peternakan	96,99	99,03	101,07	103,11	105,15	105,15
3	Penurunan Morbiditas terhadap agen penyakit dari Parasit, Bakteri dan Virus (angka kesakitan ternak)	Persen	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit, Bakteri dan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak besar	18,51	17,96	17,42	16,90	16,39	16,39
4	Peningkatan jaminan Keselamatan Ternak dan Keberlanjutan Usaha Peternakan dari Bencana	Persen	Rasio jumlah polis yang diajukan terhadap populasi ternak besar yang memenuhi kriteria	0,18	0,21	0,25	0,30	0,36	0,36
5	Peningkatan Penertiban Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persen	Rasio jumlah izin usaha peternakan yang dikeluarkan terhadap total unit pelaku usaha peternakan	0,12	0,16	0,21	0,27	0,35	0,35
6	Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan	Indeks	Indek Terima Peternak (ItPt)	104,67	105,11	105,55	105,99	106,43	106,43

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Aceh Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan pembangunan subsektor peternakan selama empat tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan peternakan di Aceh. Pada Tahun 2023 hingga 2026 pelaksanaan pembangunan peternakan ditujukan dalam rangka meningkatkan produksi peternakan yang mendukung program ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Peternakan Aceh ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPA Tahun 2017-2027 dalam menunjang tercapainya Tujuan Pembangunan Tahun 2023-2026 Pemerintah Aceh di Bidang Urusan Pertanian. Rencana Strategis Dinas Peternakan Aceh adalah sebagai pedoman (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran Dinas Peternakan Aceh dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang berhubungan dengan urusan peternakan di Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 04 Juli 2022
KEPALA DINAS PETERNAKAN ACEH

Zalsufran, ST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730609 200904 1 001